

**TELAAH KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG OLEH
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH
DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK MEMILIH DAN DIPILIH
TAHUN 2003-2018)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

oleh:

Delasari Krisda Putri

NIM E0015100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**Telaah Kewenangan Pengujian Undang Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Dalam Melakukan Perlindungan Hak Memilih Dan Dipilih Di Indonesia
(Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Memilih Dan Dipilih
Republik Indonesia Tahun 2003-2018)**

oleh:

Delasari Krisda Putri

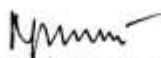
NIM E0015100


**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 12 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag
NIP. 197308042000121001


Achmad S.H., M.H
NIP. 198205062010121001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

Telaah Kewenangan Pengujian Undang Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Melakukan Perlindungan Hak Memilih Dan Dipilih Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Hak Memilih Dan Dipilih Tahun 2003-2018)

Delasari Krisda Putri
NIM. E0015100

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Jadmiko Anom Husodo S.H., M.H. :
NIP. 197004241995121001
Ketua
2. Dr. Agus Riewanto S.H.S.Ag. M.Ag. :
NIP. 197308042000121001
Sekretaris
3. Achmad, S.H., M.H. :
NIP. 198205062010121001
Anggota



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 1960110719860110

SURAT PERNYATAAN

Nama : Delasari Krisda Putri

NIM : E0015100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: TELAAH KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK MEMILIH DAN DIPILIH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003-2018) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,
Yang Membuat Pernyataan



Delasari Krisda Putri
NIM. E0015100

MOTTO

Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diantara kamu beberapa derajat.

(Q.S. Al Mujadillah ayat 11)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain”

Di dalam hidup ini, kita tak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani, apalagi ditakuti. Tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi siapa pun di sekeliling diri kita, agar diri kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain.

DELASARI K.P

ABSTRAK

Delasari Krisda Putri. 2019. E0015100. Telaah Kewenangan Pengujian Undang Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Melakukan Perlindungan Hak Memilih Dan Dipilih Di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Hak Memilih Dan Dipilih Tahun 2003-2018). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apa korelasi kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan perlindungan hak memilih dan dipilih. Kedua, bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan-putusannya tahun 2003-2018 memberikan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yaitu primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan Bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan Tahun 2003-2018 dan teori konstitusi dan perlindungan hak memilih dan dipilih, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkorelasi positif dengan hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih sebagai bentuk konkret demokrasi prosedural yang dijamin oleh konstitusi harus mendapat perlindungan terutama oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan penjaga dan pengawal konstitusi serta nilai-nilai demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes menjadi salah satu bentuk check and balances bagi berjalannya suatu pemerintahan, serta berimplikasi pada sifat kehati-hatian bagi legislatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan sejak tahun 2003-2018 menunjukkan eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap hak memilih. Namun dalam konteks hak dipilih MK RI cenderung tidak memperhatikan kondisi demokrasi yang ada di indonesia dan memaknai sempit bentuk diskriminasi. Sehingga diharapkan Mahkamah Konstitusi konsisten untuk senantiasa melindungi hak memilih, dan menggunakan pertimbangan demokrasi pada hak dipilih.

Keywords : Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang- Undang, perlindungan hak memilih dan dipilih

ABSTRACT

Delasari Krisda Putri. 2019. E0015100. Study Of The Authority Of Judicial Review By The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia In Protecting The Rights Of Choosing And Selected In Indonesia (Study Of The Constitutional Court's Decisions of the Republic Indonesia Related To The Right To Vote And Be Selected The Republic Of Indonesia 2003-2018

This study describes and examines the problem, first what is the correlation of the authority of judicial review by the Constitutional Court with the protection of the right to choose and be elected. Second, how the Constitutional Court through its 2003-2018 decisions provided protection against the right to vote and be elected.

This study is a normative legal research that is prescriptive. Types of legal materials, namely primary, secondary, tertiary. Collection techniques Legal materials used are library studies,, research instruments in the form of Constitutional Court Decisions granted in 2003-2018 and constitutional theory and protection of the right to choose and be elected, then the technical analysis used is the deductive method.

The results of the study indicate that the authority to test the law against the Constitution which is owned by the Constitutional Court is positively correlated with the right to choose and be elected. The right to vote and be chosen as a concrete form of procedural democracy guaranteed by the constitution must receive protection, especially by the Constitutional Court which is the guardian of the constitution and the values of democracy. The decision of the Constitutional Court which is erga omnes has become a form of check and balances for the running of a government, and has implications for the nature of prudence for the legislature. The decision of the Constitutional Court granted since 2003-2018 shows the existence of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which provides protection against the right to vote. But in the context of the right to be elected, the Indonesian Constitutional Court tends to not pay attention to the conditions of democracy that exist in Indonesia and narrowly define the form of discrimination. So that the Constitutional Court is expected to consistently protect the right to vote, and to use democratic considerations on the right to be elected.

Keywords : Constitutional court of the republic of indonesia, judicial review, protection the right to vote and be elected

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul, **TELAAH KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK MEMILIH DAN DIPILIH TAHUN 2003-2018)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sepanjang penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi M.S. selaku Rektor UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum di Universitas Sebelas Maret.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Suranto, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang memberikan kelancaran dalam proses penyusunan penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr.Agus Riewanto, S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan khazanah pengetahuan, bimbingan dan pengarahannya selama proses penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan kontribusi

keilmuan, bimbingan dan pengarahannya selama proses penyusunan Skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan penulis Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Skripsi ini.
8. Orang tua tercinta Bapak Sutiono dan Ibu Lilis Farida, adik adik ku , dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, semangat dan inspirasi yang tiada hentinya sehingga Penulis dapat merampungkan studi dan Skripsi ini.
9. Keluarga Komunitas Debat Fakultas Hukum UNS , Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” FH UNS, sahabat terbaik penulis fathia dan betty, kawan berpikir reski, ihsan, aji, rara, resti, tuta, indir, cici, ibeth, madani, nabil, fida, firda ,mas usep, mas dwiki, mas joman.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara moral dan materiil.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang konstitusi.....	15
2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi.....	21
3. Tinjauan tentang Pengujian Undang-undang	25
4. Tinjauan tentang perlindungan hak memilih dan dipilih.....	31
B. Kerangka Berpikir	37
BAB III PEMBAHASAN	
A. Urgensi Perlindungan Hak Memilih dan Hak Dipilih oleh Mahkamah Kostitusi	
1. Konstitusi dan konstitusionalisme	39
2. Raison D'Etre Pengujian Undang- Undang dan Mahkamah konstitusi	41

3. Urgensi Perlindungan Hak Memilih dan Dipilih oleh Mahkamah Konstitusi.....	43
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2018 dalam melindungi Hak Memilih dan Dipilih	
1. Putusan MK terkait penggunaan kartu identitas dalam Pemilihan presiden dan kepala daerah	52
a. Identitas Pemohon	52
b. Pokok Permohonan	52
c. Amar Putusan	53
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	54
e. Analisis.....	56
2. Putusan MK terkait pemaknaan frasa orang dengan Gangguan jiwa/ingatan	63
a. Identitas Pemohon	63
b. Pokok Permohonan.....	63
c. Amar Putusan	64
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	65
e. Analisis.....	68
3. Putusan MK terkait eks-PKI atau organisasi massanya Atau orang yang terlibat untuk dapat mencalonkan Menjadi anggota legislatif.....	77
a. Identitas Pemohon	77
b. Pokok Permohonan	77
c. Amar Putusan	78
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	78
e. Analisis.....	79
4. Putusan MK terkait tidak Hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang dapat mencalonkan kepala daerah	84
a. Identitas Pemohon	84
b. Pokok Permohonan	84

c. Amar Putusan	85
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	85
e. Analisis.....	86
5. Putusan MK terkait pasangan calon Kepala Daerah dapat diajukan oleh seluruh partai politik	90
a. Identitas Pemohon	90
b. Pokok Permohonan	90
c. Amar Putusan	91
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	92
e. Analisis.....	93
6. Putusan MK terkait penentuan calon legislatif berdasarkan Suara terbanyak	97
a. Identitas Pemohon	97
b. Pokok Permohonan	97
c. Amar Putusan	98
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	98
e. Analisis.....	99
7. Putusan MK terkait Mantan terpidana korupsi untuk Mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan pemilihan Kepala daerah.....	102
a. Identitas Pemohon	103
b. Pokok Permohonan	103
c. Amar Putusan	105
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	106
e. Analisis.....	110
8. Putusan MK terkait keluarga petahana diperbolehkan Mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.....	115
a. Identitas Pemohon	115
b. Pokok Permohonan	115
c. Amar Putusan	115
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	116

e. Analisis.....	118
9. Putusan MK terkait Larangan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD	124
a. Identitas Pemohon	124
b. Pokok Permohonan	124
c. Amar Putusan	125
d. Pendapat Mahkamah Konstitusi.....	126
e. Analisis.....	128
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	134
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis diyakini sebagai pedoman didalam suatu negara demokratis konstitusional yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban dari negara itu sendiri. Di dalam konstitusi itulah warga negara dapat menemukan suatu bentuk perlindungan atas hak- hak mereka. Setiap negara yang ada di dunia yang memiliki konstitusi sejatinya pasti mempunyai sebuah alasan dalam pembentukannya bahwa pada dasarnya suatu negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang mana didalamnya terdapat pusat-pusat kekuasaan baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, seperti yang diketahui baik pusat kekuasaan yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik tersebut memiliki kekuasaan yaitu kemampuan memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan itu sendiri cenderung dapat disalahgunakan, maka untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan itulah ditetapkan sebuah konstitusi yang menjadi pedoman bernegara (Sri Soemantri, 2002:229)

Demi perlindungan hak- hak dari warga negara yang dapat terjamin maka dilakukan perubahan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang memberikan kejelasan dan menentukan lebih tegas berkaitan dengan fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara didalam suatu struktur ketatanegaraan Indonesia. Di samping itu, perubahan tersebut membawa konsekuensi diaturnya beberapa ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap terkait jaminan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi dasar hak-hak konstitusional warga negara. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Alexy (*journal for constitutional theory and philosophy of law*, 2014:61) dari Oxford University “*The importance of*

constitutional rights stems from the fact that constitutional rights are rights that have been recorded in a constitution with the – subjective or objective– intention of transforming human rights into positive law, in other words, the intention of positivizing human rights qua moral rights, The reason for this is that constitutional rights are rights that have been recorded in a constitution with the intention of transforming human rights into positive law – the intention, in other words, of positivizing human rights”, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan suatu tindakan yang progresif terhadap hak-hak warga negara dengan mencantumkan dalam hukum tertinggi dan memposisikannya sebagai *moral right*. Pengaturan terkait hak konstitusional warga negara yang jenis perlindungannya beragam dalam menyahuti habjat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks personal atau individu , keluarga, public secara umum dan sebagai warga negara Indonesia menjadi buktinya nyata progredifitas tersebut.(Majda El-Muhtaj,2002:65).

Penguatan prinsip supremasi konstitusi yang dianut oleh UUD NRI 1945 menghendaki agar seluruh aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusi). Hakikat kehadiran negara dipandang sebagai pemangku mandat untuk melaksanakan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan segenap warga negara, maka penyempurnaan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM yang terdapat dalam UUD 1945, seiring dengan adanya pelembagaan MK sebagai bagian penting dari penguatan prinsip supremasi konstitusi dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern (MPR RI, 2007:9-10). Sebagai salah satu ciri penting sebuah konstitusi, jaminan perlindungan dan pemajuan HAM dalam UUD NRI 1945 memiliki keterkaitan dengan tujuan pembuatan UUD (konstitusi) yang sejatinya didorong oleh kesadaran politik yang tinggi mengenai keperluan penyelenggaraan pemerintahan negara sebaik mungkin, baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai pernyataan prinsip dan cita-cita, karena UUD sebagaimana perundang-undangan lainnya

adalah “*the resultan of a paralelogram of forces political, economic, and social which operate at the time it adoptions.*” (Ni’matul Huda, 2008:3).

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, UUD NRI 1945 memperkuat posisi kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, kewenangan untuk melakukan *judicial review* di Negara Indonesia diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang – undang terhadap undang – undang dasar adalah kewenangan MK (Pasal 24C ayat (1)). Adapun domain MA yakni menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang (Pasal 24A ayat (1)).

Berkaitan dengan norma penjaminan hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam ketentuan pasal UUD NRI 1945. Penjaminan tentang hak dipilih secara implisit tercantum dalam beberapa Pasal UUD NRI 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara penjaminan tentang hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Begitu pula, Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*) atau yang akan disebut UU Ratifikasi ICCPR yang oleh Indonesia telah diratifikasi melalui pengesahan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyebutkan pada Pasal 25 bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk turut ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, serta memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan diberikan hak pilih yang sifatnya sama, serta hal tersebut diimplementasikan melalui suatu pemunggutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpeluang menjadi senjata yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih juga merupakan gerbang bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya, memperbincangkan hak pilih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih. Begitu pentingnya makna perlindungan hak pilih membuat banyak negara demokratis di dunia mencantumkannya sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya (Bisariyadi, 2017:5).

Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat tidak terkecuali dengan hak politik. Campur tangan negara dalam pemenuhan hak politik ini dapat dilakukan melalui perencanaan dan pembuatan suatu kebijakan dan melakukan pengaturan atau regulasi terkait pemilihan umum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka kewenangan yang dimiliki oleh negara tidak boleh bertentangan ataupun menghilangkan hak memilih dan dipilih yang notabene sebagai manifestasi dari hak dasar warga negara yang dipilih. Demokrasi juga harus tetap berjalan dalam hubungan antara warga negara dengan negara. suatu Pemilihan Umum (Pemilu) jika dilihat ialah mekanisme pokok yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta sebagai wujud konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/1081/1067>, diakses Tanggal 1 November 2018 Pukul 17.24 WIB). Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Disinilah esensi dari demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Disini pula hak berserikat dan mengeluarkan pendapat diperlukan sekaligus bermakna. Hak itu diperlukan dan hanya bermakna

pada pemerintahan yang mau mendengarkan suara rakyat. (Jurnal Inovatif, Volume Viii No. I januari 2015:116).

Apabila dikaitkan dengan upaya pembentukan MK maka MK sejatinya dibentuk untuk menegakkan suatu prinsip-prinsip dari negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara (I Dewa Gede Palguna, 2013:3). Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi hal yang penting dalam setiap negara hukum yang meyakini dan menerapkan paham demokrasi sehingga menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara bersangkutan, karena ketika suatu hak-hak dasar itu dimasukkan dalam konstitusi, maka secara mutlak menjadi bagian dari konstitusi, dan konsekuensinya adalah mengikat bagi seluruh cabang kekuasaan negara (Duga Das Basu, 2003:10). Sebagaimana amanah dalam Pasal 28I ayat (4), UUD NRI 1945 telah memberikan tanggungjawab kepada negara, terutama pemerintah untuk melindungi (*obligation to protect*), memajukan (*obligation to promote*) dan memenuhi (*obligation to fullfill*) HAM sebagai tiga kewajiban dasar negara dalam penegakan HAM. Menjadikan MK sebagai saluran terakhir dalam menguji suatu produk hukum dalam hal ini adalah UU yang dicapai dengan demokrasi yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi salah satu kausalitas dari pembentukan MK sebagai konsekuensi negara hukum yang demokratis. Begitu juga dengan hak-hak dasar warga negara yang telah diakui keberadaannya dalam dokumen konstitusi, maka sebagai subjek hukum HAM, keberadaan peradilan konstitusi jelas memainkan peran yang sangat sentral dalam usaha pemajuan dan perlindungan HAM tersebut. Maka dari itulah mengapa MK diharapkan dapat menjaga konsistensinya dalam usaha pemajuan dan perlindungan HAM yang telah dijamin oleh konstitusi.

Menurut data dari Defacto yang telah melakukan penelitian terhadap putusan putusan MK sejak tahun 2003-2018 terbagai atas kelompok kelompok, 5 besar undang-undang yang banyak diuji secara berurutan

menyangkut Pemda, Hukum Pidana, Pemilu, Kekuasaan Kehakiman dan Parpol & Parlemen. Kategori Pemda ini terkait UU Pemda, UU Pilkada, UU Otsus Papua, UU Desa, UU Pemerintahan Aceh, UU Pemerintahan DKI Jakarta, dan undang-undang terkait pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan kategori Hukum Pidana melingkupi KUHAP, KUHP, Pemberantasan Tipikor, Narkotika, Pencegahan TPPU, Tindak Pidana Terorisme dan lainnya. Kategori Pemilu, melingkupi UU Pemilu, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden, dan UU Penyelenggara Pemilu. Sedangkan kategori Kekuasaan Kehakiman menyangkut pengujian terhadap UU MK, UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial dan lainnya. Terkait Parpol dan Parlemen ini menyangkut UU MD3, UU Partai Politik dan lainnya. (<http://defacto.id/edisi01.html>, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 21.00 WIB). Meskipun terlihat cukup beragam, namun dilihat dari karakternya, isu pengujian undang-undang di MK lebih banyak didominasi oleh isu politik. Undang-Undang Paket Politik yakni menyangkut Pemilu, Pilkada, MD3 dan Partai Politik mendominasi pengujian di MK. Bandingkan dengan pengujian pada isu ekonomi dan kesejahteraan sosial jauh dibanding isu-isu politik dan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini akan mencoba untuk mengulas lebih lanjut apakah mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang konkritisasinya ialah dalam bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) yang dikabulkan baik seluruhnya ataupun sebagian sudah mencerminkan konsep perlindungan HAM dengan batasan-batasan persoalan yang akan diungkap hanya terkait Putusan- Putusan MK RI terkait hak untuk memilih dan dipilih yang dikabulkan. Tentunya tulisan ini tidak hanya sekedar untuk mendeskripsikan terhadap apa yang telah dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya selama ini. Akan tetapi lebih dari itu yakni sebagai bentuk analisa secara obyektif terhadap peran, tugas, dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang ternyata memiliki arti penting dan andil nyata bagi perkembangan dan arah demokrasi Indonesia.

Adapun judul penelitian hukum (skripsi) ini ialah **“Telaah Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Melakukan Perlindungan Hak Politik di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Hak Memilih dan Dipilih Tahun 2003-2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok bahasan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apa urgensi Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak memilih dan dipilih?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya Tahun 2003-2018 telah melakukan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Menemukan urgensi mahkamah konstitusi memberikan perlindungan hak memilih dan dipilih
2. Menganalisis putusan putusan mahkamah konstitusi dalam melakukan perlindungan hak memilih dan dipilih.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat menjadi bahan eksaminasi guna mengetahui sejauh mana Mahkamah Konstitusi melindungi hak dipilih dan memilih sebagai konkretisasi fungsi *Guardian of Constitution*.

b. Membangun kerangka dan pondasi awal

mengenai putusan- putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak memilih dan dipilih.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis temuan penelitian ini menjadi jembatan penghubung bagi penulis untuk menjawabantahkan serta mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah.. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pentingnya suatu sistem pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan perlindungan hak memilih dan dipilih.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan suatu metode penelitian yang kemudian akan digunakan Penulis untuk menunjang hasil penelitian tersebut guna mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal (*doktrinal research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan – bahan hukum (*library based*) sebagai dasar pijakan yang berfokus pada penelaahan bahan – bahan hukum primer dan sekunder guna menghasilkan serangkaian argumentasi, teori atau konsep yang baru sebagai upaya preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Menurut Terry Hutchinson (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2014:54), “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.*” Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif (hukum tertulis). Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui putusan MK yang berkaitan dengan Hak Memilih

dan Dipilih sudah mencerminkan konsep perlindungan Hak memilih dan Dipilih yang diamanahkan dalam UUD NRI 1945 dan beberapa derivasi peraturan dibawahnya yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisis Putusan Putusan MK yang berkaitan dengan Hak Memilih dan Dipilih adalah bersifat deskriptif analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2008:10) bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum (Abdulkadir Muhammad, 2004:26). penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan memaparkan secara lengkap bagaimana putusan-putusan MK terkait hak memilih dan dipilih apakah sudah memberikan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dalam hal ini adalah Putusan MK dengan UUD NRI 1945, UU HAM, dan UU ratifikasi ICCPR. Adapun pendekatan konseptual doktrin-doktrin atau teori yang berkaitan dengan kajian terkait korelasi antara konstitusi, mahkamah konstitusi dengan perlindungan hak memilih dan dipilih yang diberikan melalui putusan-putusannya. Sementara itu,

pendekatan sejarah ialah berkaitan dengan penelusuran terhadap putusan-putusan MK sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hak memilih dan dipilih.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:181)..

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak memilih dan dipilih Tahun 2003-2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan bahan – bahan hukum sekunder yang meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Adapun publikasi tentang hukum mencakup buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:195-196). Semua bahan tersebut akan dikaitkan dengan isu hukum yang relevan dengan isu hukum yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan, ataupun arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014:21). Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Sugeng Istanto, 2007:56).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan melakukan studi dokumen terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan MK dan/atau norma perlindungan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya akan dianalisis mengenai apakah MK melalui putusan- putusannya dalam pengujian undang-undang yang terkait dengan hak politik telah memberikan perlindungan hak memilih dan dipilih.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi atau pengajuan dari premis mayor ke premis minor dalam konstruksi silogisme (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90). Dalam konteks penelitian ini bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui kewenangan MK dalam menguji UU sudah memberikan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih atau tidak, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh secara garis besar mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menjabarkan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang bersumber pada bahan hukum yang digunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

A. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berisikan tinjauan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat dijadikan landasan dan memberikan penjelasan secara teoritik. Tinjauan-tinjauan tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Konstitusi
2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi
3. Tinjauan tentang Pengujian Undang-Undang
4. Tinjauan tentang Perlindungan Hak Memilih dan Diipilih

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan dituangkan dalam bentuk bagan yang berfungsi untuk menunjukkan alur berfikir yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan secara komprehensif berdasarkan rumusan permasalahan, yaitu:

1. Apakah urgensi mahkamah konstitusi memberikan perlindungan hak memilih dan dipilih?
2. Apakah mahkamah konstitusi melalui putusan-putusannya Tahun 2003-2018 telah melakukan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih?

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan

penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Konstitusi

Dalam arti pembentukan istilah konstitusi sebagaimana pendapat dari Astim Riyanto (2000:17) berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu Negara. A. Himmawan Utomo (2007:2) memberikan dua macam tentang pengertian konstitusi yang dapat dimaknai dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Konstitusi yang hanya mencantumkan norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara dimaksud sebagai konstitusi dalam arti sempit, sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”.

Menurut Soemantri Martosoewignjo (2000:1), istilah konstitusi berasal dari perkataan “*Constitution*”, yang dalam bahasa Indonesia kita ketahui dengan istilah hukum yang lain, yaitu Hukum Dasar dan/atau Undang-Undang Dasar. Selaras dengan pendapat Sri Soemantri tersebut, Nyoman Dekker dalam A. Himmawan Utomo (2007:7) mengemukakan didalam pemahaman *Anglo-Saxon* konstitusi disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Suatu konstitusi berlaku efektif sebagai hukum dasar yang mengikat dan berlaku atas dasar prinsip kedaulatan yang dianut dan dipahami dalam suatu negara.

Didalam memahami arti konstitusi sendiri, Herman hellen berpendapat sebagaimana dikutip dalam bukunya Prof Dr Bintan Regen Saragih (2006:4) bahwa konstitusi dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu:

- 1) Konstitusi sebagai pengertian sosial politik.

Pada pengertian pertama ini konstitusi belum

merupakan pengertian hukum, ia baru mencerminkan keadaan social politik suatu bangsa. Disini pengertian hukum adaalah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau *political decision*.

2) Konstitusi sebagai pengertian hukum (*rechtsfervassung*)

Pada pengertian kedua ini, keputusan-keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku (*gehoren*). Pemahaman arti politik diartikan sebagai *eine seine* yaitu suatu kenyataan yang harus berlaku dan diberikan suatu sanksi kalau hal tersebut dilanggar. Kemudian bentuk ini mengandung pengertian-pengertian hukum (*rechtsfervassung*) yan tidak tertulis, akan tetapi *rechtsfervassung* ada juga yang tertulis, hal ini timbul sebagai pengaruh aliran kodifikasi, yaitu untuk menghendaki sebagian hukum ditulis dengan maksud untuk:

- (a) mencapai kesatuan hukum (*rechtseineheid*)
- (b) kesederhanaan hukum (*rechtvereenvoudiging*)
- (c) kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

3) Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum

Merupakan suatu peraturan hukum yang tertulis, sehingga dapat dikatakan Undang-undang dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi.

Kewenangan negara untuk mengatur, mengendalikan dan mengontrol kehidupan masyarakat, karena adanya HAM yang secara hakiki justru membatasi kekuasaan itu, karena HAM atau hak-hak dasar warga Negara harus dihormati, dihargai dan diwujudkan dalam kehidupan dalam kehidupan bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi atau hak dasar sekalipun tidak bersumber dari konstitusi akan tetapi konstitusi harus menjamin dan melindungi hak-hak itu. (Jhon Pieris, 2007:41)

Konstitusi sendiri seperti yang dinyatakan oleh K.C.Wheare memiliki dua pengertian yaitu *“is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. This rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and partly non-legal or extra-legal, taking from the usages, understandings, custom, or convention which courts do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government”* (K.C. Wheare, 1975:1). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa istilah konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis pengertian yaitu pertama konstitusi dalam arti luas yang mana mencakup usages, custom, and convention atau aturan-aturan yang tidak tertulis. Dan yang kedua konstitusi dalam arti sempit yang mana hanya mencakup konstitusi dalam bentuk tertulisnya saja. Atas dasar pendapat tersebut maka konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya dalam suatu negara. Apa saja yang merupakan aturan pokok ketatanegaraan itu dapat dijumpai dalam materi muatan konstitusi. (K.C. Wheare, 1975:2).

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya konstitusi adalah ditujukan guna menjamin hak-hak yang diperintah, untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, , dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu: (A. Himmawan Utomo, 2000:12)

- a) Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- b) Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan(A.Himmawan Utomo, 2000:13).

Undang-Undang Dasar atau *vervassung*, menurut Carl Schit

dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. (Ismail Saleh, 1998:18). Berarti konstitusi disini mempunyai kedudukan atau derajat yang tinggi (*Supremacy of constitution*) dalam suatu negara. Maksud dari supremasi konstitusi yaitu dimana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. (Parlin M.Mangunsong, 1992:22). Menurut K.C Wheare, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa “konstitusi akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Dengan demikian, dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa”.(K.C.Wheare,1975:1).

Sehubungan dengan penilaian terhadap bagaimana konstitusi dilaksanakan, Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolution* (Astim Riyanto,2007:311) mengemukakan setidaknya ada tiga jenis yang sekaligus tingkatan nilai (value) konstitusi, yaitu, nilai nominal, nilai normatif dan nilai semantik.

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger sebagai suatu akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*) adalah fungsi adanya konstitusi dan merupakan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara adalah konstitusi itu sendiri. Maka guna melaksanakan dan mengefektifkan fungsi ini, setiap negara di dunia ini selalu mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo (1975) menyatakan: “*Tidak orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi*”(Astim Riyanto, 2007:344)., mari kita lihat fungsi konstitusi dalam arti Undang Undang Dasar adalah sebagai syarat berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk bila dilihat dari segi waktu Undang-Undang Dasarnya

ditetapkan. Terlepas dari waktu ditetapkannya, sebelum atau sesudah suatu negara negara terbentuk, yang menjadi suatu kepastian adalah fungsi konstitusi itu adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah. (Astim Riyanto, 2007:350).

William G. Andrews memberikan pemahaman dalam bukunya William G. Andrews, misalnya, dalam bukunya *Constitutions and Constitutionalism* (1968:23) menyatakan bahwa: *“The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders the people under democracy, the king under monarchy – to the organs of State power”*. Oleh karena itu, menurut William G. Andrews, *“Under constitutionalism, two types of limitations impinge on government. ‘Power proscribe and procedures prescribed’*. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam konstitusi. Jadi, dalam anggapan ini, Konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi (*supremation of law*) yang harus ditaati, bukan hanya rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

Konstitusi yang ada di Indonesia menjadi tonggak yang penting bagi berjalannya demokrasi karena konstitusi tidak terlepas dari warga negara. Konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, dan berfungsi sebagai instrumen documenter untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal kepada organorgan kekuasaan Negara. Seperti yang dikatakan C.F. Strong (1972 :10)

bahwa konstitusi merupakan *“a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjuste”*, atas dasar itulah konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara sebab konstitusi mengatur baik para penyelenggara negara maupun warga negara sehingga pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ organ negara harus berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditolerir karena akan menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Karena itulah paham konstitusionalisme juga terkait dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*check and balances*), dimana kekuasaan lembaga-lembaga negara dibagi secara seimbang (Susi Dwi Haridjanti, 2011:628)

Berkenaan dengan materi muatan UUD NRI 1945 didalamnya terdapat 37 Pasal yang juga ditambah dengan 4 (empat) Pasal tambahan , hal tersebut ditujukan guna konkretisasi dari pokok pikiran yang mendasar yang terkandung dan menjadi ruh pembuatan yakni Pembukaan UUD NRI 1945. Di dalamnya berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu (Susi Dwi Haridjanti, 2011:500):

- a) Pasal-pasal yang menegaskan materi muatan yang berkaitan tentang regulasi sistem pemerintahan negara, dalam hal ini pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dari suatu kelembagaan negara yang juga saling berhubungan .
- b) Pasal yang menegaskan muatan materi berkaitan bagaimana hubungan antara negara dengan warga negara dan penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang : pertahanan keamanan, ekonomi, politik serta sosial dan budaya. Kearah mana negara bangsa dan rakyat indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.

Hakikat konstitusi menurut Bagir Manan (2008:16) adalah

perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan di satu pihak dan jaminan hak-hak warga negara atau penduduk di pihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak milik, kesejahteraan (*wealth*) dan kebebasan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa hakikat konstitusional adalah pembatasan kekuasaan pemerintahan untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengakibatkan akibat negatif bagi pemerintahan dan masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digunakannya konstitusi sebagai pembatas kekuasaan tersebut dapat kita amati dari materi muatan yang selalu terdapat dalam setiap konstitusi, menurut Steenbeek materi muatan konstitusi umumnya selalu berisi tiga hal pokok yaitu (Sri Soemantri, 1992:46) :

- a) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang fundamental.
- c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

2. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi

Pelaksanaan *judicial review* yang pada mulanya diperkenalkan oleh John Marshall memberikan implikasi yang sangat berharga bagi negara lain di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia, hal ini ditandai dengan berdirinya MK RI. Pembentukan MK sejatinya menjadi hal yang menandai era baru dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak dapat terjamah sama sekali (*untouchable*) oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (Bambang Sutiyoso, 2009:1.)

Usulan awal mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi tercatat pada rapat ke-32 PAH I, pada 7 Mei 2000. Adalah Gregorius Seto

Hariato dari Fraksi PDKB (F-PDKB), yang memulainya. Awalnya diusulkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang sama sekali tidak permanen. “Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang tidak permanen berfungsi sebagai pengadilan bagi penyelenggara negara yang dianggap melanggar UUD menurut aturan yang ditetapkan dengan UU,” ujar Gregorius Seto Harianto. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008:284)

Gagasan dibentuknya MK merupakan salah satu gagasan yang muncul di abad ke-20 sebagai wujud perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern. Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan maka terdapat masa resistensi untuk menunggu pembentukan MK maka kemudian MPR menetapkan MA sementara guna menjalankan fungsi MK sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. tidak lama setelah itu DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan yang cukup maka DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden. (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). tidak lama setelah itu tepatnya dua hari kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya diumumkan. Langkah selanjutnya perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> /index.php?page=website. Profil.Sejarah MK, diakses pada tanggal 1Oktober 2018 Pukul 13.45 WIB).

Mahkamah konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih

spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum privilegiatum atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan (Moh. Mahfud, 2011:118)

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai *guardian of constitution* yaitu untuk mengawal dan memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan dan dihormati oleh para penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi (*The Interpreter of Constitution*). Jika dilihat secara seksama di beberapa negara MK ternyata juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Maruarar Siahaan (2011:11) mengamukakan sejak dimasukkannya dan diaturnya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945, maka MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung konstitusi dalam konteks kali ini ialah melindungi hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Keberadaan MK ditujukan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang tidak menimbulkan kekacauan, stabil, dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi (Bambang Sutowo, 2010:29). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Landasan filosofis dari segala kewajiban serta kewenangan MK adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip *good governance* dan keadilan substantif. disisi lain dalam teori-teori hukum yang lain juga memperkuat keberadaan MK sebagai lembaga negara penafsir konstitusi dan pengawal serta pelindung konstitusi. Kehadiran MK beserta seluruh

wewenang dan kewajiban yang melekat padanya, menjadi salah satu penilaian tersendiri perihal MK telah menggantikan doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dengan ajaran supremasi konstitusi (Mariyadi Faqih, Juni 2010: 97.)

Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir UUD NRI 1945 melalui putusan-putusannya. Dalam melaksanakan setiap tugas konstitusionalnya, MK selalu berupaya agar dapat mewujudkan visi kelembagaan yang menjadi arah dari pembentukan MK itu sendiri, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Visi tersebut sejatinya menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjadi salah satu tanggung jawabnya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. MK juga membuka diri untuk menerima permohonan dari seluruh masyarakat yang merasa hak-haknya konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya suatu undang-undang melalui mekanisme pengujian undang-undang (Bambang Sutyoso, 2010: 26).

Kewenangan MK diatur secara implisit verbis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Sedangkan kewajiban MK ditentukan dalam Pasal 24C ayat (2). (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123664-PK%20III%20643.8279-Legal%20standing-Tinjauan%20umum.pdf>, diakses tanggal 4 November 2018 pukul 23.00 WIB). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat yang tidak ada mekanisme banding dan kasasi terhadap putusan MK untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah:

1. Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945

2. Memutuskan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
3. Memutus Pembubaran Partai Politik (Parpol)
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.

Di dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar. Kewenangan ini berkaitan dengan proses pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan atau Wakil Presiden.

3. Tinjauan tentang Pengujian Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang sering juga disebut sebagai *Judicial review* atau secara lebih spesifik dalam konteks penelitian ini *constitutional review* ialah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sejatinya merupakan konsepsi hukum dalam sistem-sistem hukum yang berbeda dan mengalami sejarah yang sangat panjang. Bentuk pokok gagasan *Constitutional Review* ini adalah berdasarkan adanya hierarki atau jenjang norma hukum yang menempatkan norma dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem norma (Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4 Agustus, 2010:25). Keseluruhan norma-norma yang validitasnya dapat ditelusuri kepada satu norma dasar dan norma dasar yang sama membentuk satu sistem norma-norma, merupakan sebuah tertib normatif. Norma dasar tersebut merupakan sumber validitas yang sama bagi semua norma yang termasuk dalam tertib yang sama dan merupakan alasan validitas yang sama bagi keberlakuan norma.(Hans Kelsen:1967).

Pada dasarnya konsep *constitutional review* berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Istilah *judicial review* sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan

konstitusi (Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari–April, 2013:58). Pada tahun 1803 dalam kasus “*Marbury vs Madison*” istilah ini pertama kali digunakan, dibawah *Chief Justice* John Marshall yang memutus perkara dengan cara pengujian materil undang-undang, yakni dengan mengadakan *judicial review* terhadap UU yang dilihat dan dipandang cenderung bertentangan dengan konstitusi. Kasus ini sendiri bermula pada saat John Adams yang dikenal sebagai tokoh Federalist (Partai Federal) menjabat sebagai Presiden AS yang kedua untuk masa jabatan 1797-1801. Persoalan mulai muncul ketika John Adams sebagai *incumbent* pada Pemilu tahun 1800 kalah dari pesaingnya Thomas Jefferson dan Aaron Burr. Sementara yang memenangkan Pemilu adalah Thomas Jefferson dari Partai Democratic Republic. Oleh kerananya, menurut konstitusi, yang akan menjadi Presiden selanjutnya untuk masa bakti 1801-1805 adalah Thomas Jefferson. Ia akan mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 4 Maret 1801. Dalam masa peralihan menjelang pergantian presiden itulah John Adams membuat banyak kebijakan dan keputusan yang menurut banyak analis dianggap sebagai upaya nepotisme atau upaya untuk mendudukkan teman dekat dan kerabatnya pada posisi-posisi tertentu sebelum ia digantikan oleh Presiden terpilih Thomas Jefferson. Salah satu diantara mereka yang ditempatkan oleh John Adams itu adalah John Marshall. Sebelumnya ia adalah *Secretary of State* (Menteri Sekretaris Negara) namun kemudian diangkat oleh John Adams menjadi Ketua Mahkamah Agung AS (*Chief Justice*).(<http://jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2019).

Pengangkatan-pengangkatan yang demikian ternyata terus menerus dilakukan oleh John Adams, bahkan hingga detik-detik terakhir pergantian presiden, yaitu malam tanggal 3 Maret menjelang dini hari tanggal 4 Maret 1801. Di waktu-waktu terakhir itu John Adams masih sibuk menandatangani beberapa surat keputusan

pengangkatan hakim perdamaian (*justice of piece*) dengan dibantu oleh John Marshall yang ketika itu merangkap jabatan sebagai *Secretary of State* sekaligus *Chief of Supreme Court*.

Sebetulnya tindakan penandatanganan surat keputusan pengangkatan (*commission*) itu dapat dikatakan hanya bersifat administratif (penetapan) saja, karena secara prosedural, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat pengangkatan itu sudah ditempuh sebelumnya. Misalnya telah mendapat persetujuan Senat dan sebagainya. Mereka-mereka yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan hakim perdamaian itu antara lain ialah William Marbury, Denis Ramsay, Robert Townsend, William Harper. Karena surat pengangkatannya itu ditandatangani dan dicap di detik-detik terakhir menjelang pergantian Presiden dari John Adams ke Thomas Jefferson (4 Maret 1801), William Marbury dan kawan-kawannya itu kemudian dijuluki sebagai “*midnight judges*” Celakanya, karena ditandatangani dalam waktu yang sempit dan tergesa-gesa, salinan surat pengangkatan tersebut tidak sempat diserahterimakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya karena esok harinya, tanggal 4 Maret 1801 adalah hari pergantian presiden dari John Adams ke Thomas Jefferson. Akhirnya surat-surat tersebut ditahan di kantor kepresidenan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai *Secretary of State* untuk menggantikan John Marshall yang telah duduk di bangku *Supreme Court*. Madison menahan surat itu karena dianggap sudah tidak relevan karena Presiden sudah berganti dari John Adams ke Thomas Jefferson. (Lihat Jimly Asshiddiqie, 2008:17). Di pihak lain, Marbury dkk yang menganggap proses pengangkatannya konstitusional dan telah memenuhi prosedur yang benar, tidak begitu saja menerima penahanan surat tersebut. Pada Desember 1801, Marbury melalui kuasa hukumnya Charles Lee (Mantan Jaksa Agung Federal) mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung Federal agar sesuai kewenangannya berdasarkan *section 13 Judiciary Act 1789* mengeluarkan *Writs of*

Mandamus, agar Pemerintah Federal menyerahkan salinan surat pengangkatan mereka sebagaimana mestinya.

Kasus ini sendiri pada waktu itu sangat kontroversial dan menyita perhatian. Sementara publik pada umumnya tidak bersimpati terhadap permohonan Pemohon (Marbury dkk). Dalam perjalanannya, persidangan yang sebetulnya kental dengan nuansa politis ini sempat mendapat resistensi dari Pemerintahan Thomas Jefferson yang kala itu juga menguasai Kongres. Pemerintah yang pada waktu itu diwakili oleh *Secretary of State* James Madison menolak memberikan keterangan di persidangan. Di pihak lain, Kongres mengesahkan undang-undang yang pada pokoknya berisi penundaan seluruh persidangan *Supreme Court* selama 14 bulan, dari Desember 1801 hingga Februari 1803.

Setelah menjalani tahun tanpa persidangan (1802), persidangan atas kasus Marbury versus Madison ini kembali digelar pada Februari 1803. Setelah melalui proses yang cukup panjang dengan resistensi yang kuat dari pemerintahan Thomas Jefferson dan Kongres yang mendukungnya, *Supreme Court* dibawah pimpinan John Marshall akhirnya menjatuhkan putusan atas kasus tersebut pada bulan itu juga (Februari 1803).

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung AS sendiri memuat banyak keunikan dan penemuan hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada pokoknya putusan tersebut menolak tuntutan Marbury dkk yang meminta agar MA mengeluarkan *Writs of Mandamus* berdasarkan *Judiciary Act 1789*. Uniknya di dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) MA justru membenarkan dalil-dalil (posita) Pemohon dan menyatakan bahwa sebetulnya permohonan Pemohon beralasan hukum. Dengan kata lain Pemohon memiliki kedudukan hukum serta memiliki alas hukum (berhak) yang sah atas apa yang ia menuntut (surat pengangkatan hakim perdamaian; *commission*). Akan tetapi mengapa kemudian amar putusannya justru menolak tuntutan Pemohon ?. Permohonan Marbury

dkk ditolak bukan karena alasan-alasan permohonannya (posita) tidak dapat diterima atau tidak beralasan hukum, melainkan karena tuntutan mereka (petitum) yang meminta MA mengeluarkan *Writs of Mandamus* berdasarkan *Section 13 Judiciary Act 1789* yang tidak dapat dipenuhi oleh MA. Sebaliknya, MA justru menilai ketentuan *Judiciary Act 1789* yang dijadikan dasar bagi Marbury dkk untuk meminta MA mengeluarkan *writ of mandamus* itu tidak sesuai dan bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi AS. Oleh karena itu MA tidak bisa mengabulkan tuntutan Pemohon dan justru malah membatalkan *Judiciary Act 1789* karena dianggap inkonstitusional

Sejak putusan itu dunia peradilan Amerika dibekali kewenangan *judicial review* terhadap UU. Termasuk bagi perkara individual. Belanda dalam sejarahnya sebagai penganut paham eropa kontinental menolak konsep *constitutional review*. Belanda cenderung mengedepankan upaya administrasi melalui lembaga peradilan administrasi (*administrative court*). Namun demikian di Belanda juga dikenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). Walau pun antara *toetsingsrecht* dengan *judicial review* memiliki pengertian dasar yang berbeda, kedua mekanisme ini memiliki substansi tujuan yang sama, yakni perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan penghargaan terhadap konstitusi sebagai norma dasar (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari, 2011:18-19)

Di Indonesia, Mohammad Yamin merupakan tokoh pertama yang tercatat mengajukan pemikiran tentang *judicial review* dalam sebuah forum resmi.(Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013, diakses Tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 21.30 WIB). Ini terjadi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan; apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD. Usulan ini menandakan bahwa pemikiran tentang *judicial review* telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Bahkan, usulan ini mengindikasikan bahwa ada sebagian

kalangan yang menginginkan terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang berimbang (*balance*), dan menjunjung supremasi konstitusi. Lepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia. Alasan Soepomo sebenarnya masuk akal. Judicial Review bisa dilaksanakan dengan sempurna apabila masing-masing lembaga ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sejajar. Selain itu, alasan lainnya adalah menyangkut kesiapan para hakim dalam menangani kasus-kasus hukum dalam ranah pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Nurainun Simangunsong, 2008:7).

Dua tugas pokok dalam uji konstiusionalitas undang-undang (*constitutional review*) menurut Jimly Asshidiqie (2005:10) yaitu:

- a) Menjamin berfungsinya sistem demokrasi antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan; dan
- b) Melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin oleh konstitusi.

Pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dipersyaratkan dalam negara hukum dan demokrasi tersebut dilimpahkan kewenangannya kepada MK. Sebelum lahirnya MK melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, hakim hanya berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Sri Soemantri (1977:18) membagi “hak menguji” tersebut atas (i) hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*) dan (ii) hak menguji materiil (*Materiele toetsingsrecht*). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, apakah satu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui formalitas atau cara-cara (prosedur) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang diuji adalah tata cara pembentukan suatu undang-undang dan lembaga yang membentuknya. Hak menguji materiil adalah wewenang menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi atau materi muatan suatu peraturan peraturan perundangundangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Jimly Asshidiqie (2006: 62-63) mengemukakan bahwa uji formil akan memeriksa konstitusionalitas undang-undang dari segi procedure atau tata cara pembuatan yang diharuskan Undan-Undang Dasar dan dari segi kelembagaan (institutional) yang berhak untuk menyusun, membentuk, dan mengesahkan. (Berkaitan dengan pengujian undang-undang tersebut, UU MK menyatakan bahwa dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a) pembentukan undangundang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD NRI 1945 yang disebut uji formil
- b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang disebut uji materiil.

4. Tinjauan tentang perlindungan hak memilih dan dipilih

Konsep HAM pada dasarnya memiliki dua makna yang fundamental, pertama yaitu hak yang tidak tdkapat dikurangi atau dicabut dalam bentuk apapun karena hak ini berasal dari setiap insan manusia agar martabat nya sebagai manusia seutuhnya dapat terjamin. Dan yang kedua adalah hak berdasar hukum, yakni hak yang dibentuk atas dasar mekanisme pembuatan atau pembentukan hukum dalam suatu masyarakat nasional maupun internasional yang berdasar atas kesepakatan bersama antara penguasa dan rayat yang tunduk dalam suatu pemerintahan. (Syahrudin, 2010: 1).

Hak memilih dan dipilih termasuk dalam hak politik. Karena konsepsi hak politik dan sipil adalah terkait hak-hak yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk turut serta menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Hak untuk memberikan suara dalam PEMILU yang berkala merupakan hak universal dan setara. (Jurnal Analisis Sosial, Volume 7, 2002:17)

Hak politik khususnya hak untuk memilih dan dipilih juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dalam Pasal 43 yang menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;

(2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. “

Begitu pula dalam Pasal 44 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari semuaa konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi instrument hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia menncakup hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- b) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan lansung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.

- c) Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
- d) Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan public di dalam pemerintahan.

Menurut teori Franchise lebih menekankan pada hak politik dan bentuk hak, lisensi, hak memilih, hak pilih atau hak suara. Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga Negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara (<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24176/SKRIPSI%20FATHUL%20RAHMAN%20KURNIAWAN%20-%20E111%2013%20004.pdf?sequence=1>, diakses Tanggal 7 November 2018 Pukul 01.30 WIB).

Hak warga Negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga Negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Sehingga hak tersebut sangat patut untuk diberikan perlindungan yang optimal dan maksimal dari negara sebagai pengembang tanggungjawab.. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga Negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung. Dengan turut sertanya rakyat dalam memilih dan dipilih menjadi suatu bukti konkret bahwa benar kedaulatan sesungguhnya adalah ditangan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora juga menjelaskan (2011: 137-138), bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.

Selain itu hak memilih dan dipilih adalah suatu bentuk pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (1) serta pasal 28D ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 yang secara khusus juga di atur dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi :

“setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam suatu Kerangka hukum harus dapat memberikan kepastian bahwa semua warga negara berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi serta berhak untuk dipilih dan memilih secara universal dan adil. (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*.2002).

Hak untuk memilih atau menyalurkan suara dan dipilih ialah bersifat universal dan sama . Satu standar internasional yang jelas yang harus disediakan adalah jaminan yang bersifat universal dan hak memberikan suara yang sama bagi setiap warga negara dewasa. Hak untuk dapat dipilih sebagai anggota DPRD misalnya atau pemilihan badan lokal serta hak untuk dipilih sebagai presiden, mungkin mewajibkan suatu usia di luar usia dari mayoritas, tetapi harus diberikan tanpa terkecuali kepada semua warga negara dari usia itu dan tanpa diskriminasi. Kerangka hukum harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap warga negara di atas usia tertentu berhak memberikan suara dan bahwa setiap orang yang memiliki hak memberikan suara diperbolehkan untuk menjalankan hak itu tanpa diskriminasi, berdasarkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau pendapat, perkumpulan dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau

status lainnya yang berbeda tentu mencerminkan diskriminasi maka hal tersebut tidak diperkenankan dan tidak dapat mencabut hak warga negara yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan suara atau bersaing dalam pemilu (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*,2002).

Adanya pembatasan atas hak memberikan suara harus selalu dalam konteks kerangka hukum yang jelas dan tegas saat bagaimana keadaan-keadaan yang bisa menjadi dasar pembatasan atau penangguhan hak seseorang untuk memberikan, dengan cara apa atau sejauh mana. Adanya pembatasan atau pengekangan atas hak untuk memilih atau dipilih pada dasarnya dapat dibenarkan hanya berdasarkan keadaan-keadaan yang luar biasa atau menurut prinsip-prinsip yang dapat diterima. Dengan wilayah hukum yang berbeda tentu pendekatannya berbeda terhadap masalah pemberian hak untuk memberikan suara kepada para terpidana: ini bervariasi mulai dari larangan total untuk mendaftar sebagai pemilih bagi setiap orang yang dipidana karena pelanggaran apa saja, hingga pembatasan hak-hak dalam kasus di mana hukuman ditetapkan atas pelanggaran teridentifikasi tertentu (misalnya kejahatan moral) dengan jangka waktu hukuman yang telah diputuskan, hingga pembebasan sama sekali dari pembatasan-pembatasan bagi narapidana. Setiap kelas warga negara yang hak pilihnya dibatalkan diketahui sebelumnya merupakan prinsip keadilan alamiah mengharuskan. Pembatalan itu harus secara jelas diletakkan dalam kerangka hukum dan tidak dilakukan karena pertimbangan sewenang-wenang dari suatu lembaga atau perorangan. Karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar maka pemeriksaan dan kesiagaan mutlak diperlukan (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*.2002)

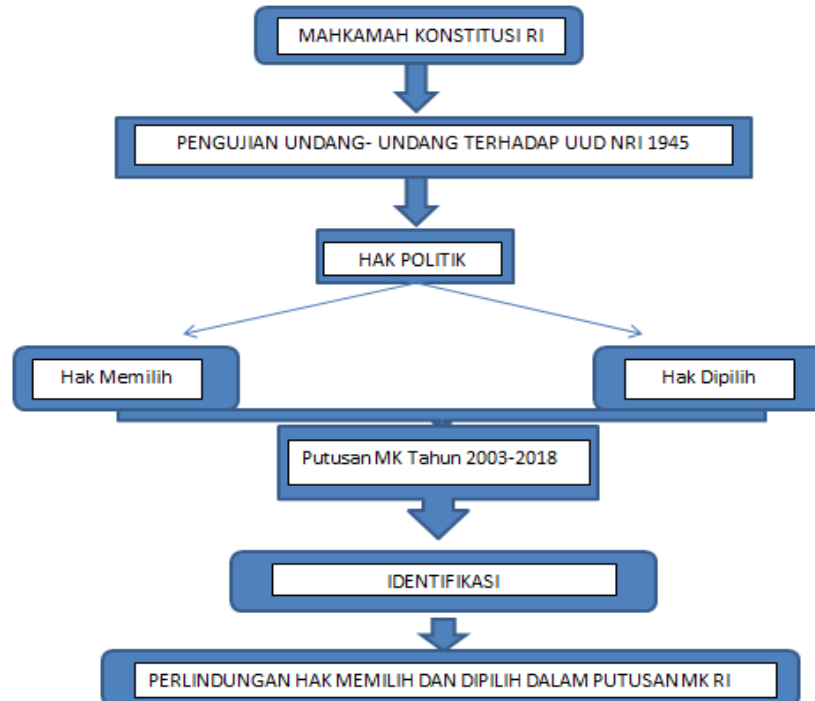
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik. dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mengukuhkan pokok pokok hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait, Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam kovenan hak sipil dan politik ditegaskan Pasal 25 “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum

B. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenangnya ialah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tentu memiliki peran yang sangat sentral , tujuan dari hal tersebut tidak lain adalah menjaga agar Undang-Undang yang dibuat dan berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan materi muatan yang ada dalam konstitusi yaitu UUD NRI 1945. Dalam melakukan permohonan pengujian Undang-Undang di MK RI maka pemohon harus dapat menjelaskan hubungan kausalitas terkait hak apa yang terlanggar apabila Undang-Undang tersebut tetap diterapkan. Yang kemudian hasil dari pengujian tersebut akan dituangkan dalam bentuk Putusan MK.

Penelitian ini akan mengidentifikasi Putusan-Putusan MK RI yang berkaitan dengan hak memilih dan hak dipilih yang terjadi dalam kurun waktu 2003-2018. Karena hal ini berkaitan dengan amanah konstitusi dalam

pasal 28 I Ayat (4) yang menyebutkan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Seperti yang kita ketahui proses pengujian undang-undang dilakukan ketika terdapat suatu undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, maka juga kita perlu mengetahui urgensi mengapa MK RI menjadi gerbang terakhir bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak nya khususnya dalam hak memilih dan dipilih. Sehingga menjadi patut untuk diketahui apakah selama ini MK melalui putusan- putusannya dalam melakukan pengujian Undang-Undang terkait hak memilih dan dipilih telah memberikan perlindungan hak asasi manusia.

Atas dasar hal tersebut penulis akan mengkaji dan mengidentifikasi Putusan-Putusan MK terkait hak memilih dan dipilih sejak tahun 2003-2018, kemudian penulis akan menganalisis apakah putusan-putusan MK tersebut benar-benar telah memberikah perlindungan hak politik berdasarkan UUD NRI 1945 beserta derivasi peraturan yang berada dibawahnya. Sehingga akan diketahui

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hak Memilih Dan Dipilih oleh Mahkamah Konstitusi

1. Konstitusi dan konstiusionalisme

Eksistensi konstitusi saat ini yakni dalam konteks negara modern ialah sebagai wujud konkret atas kesepakatan bersama yang dilakukan atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Karena jika berlandaskan pada teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J Reaousseu mengapa suatu negara dibentuk tidak lain karena untuk menampung aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut agar dapat terlindungi, karena rakyat secara individu tidak dapat melakukannya sendiri. Sehingga atas dasar tersebut maka Konstitusi juga memiliki muatan terkait hak-hak dari rakyat yang harus dilindungi melalui pembentukan organisasi atau lembaga agar kehidupan bernegara dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Oleh karena itu konstitusi menurut Brian Thompson (1997:3) adalah menjadi hal yang mengikat dari setiap sisi lembaga maupun komponen yang ada dalam suatu negara. Pemahaman mengenai adanya konstitusi dalam suatu negara harus dipandang dari sisi pelaksanaannya yang bukan hanya sekedar dokumen, namun konstitusi sendiri tidak lain ditujukan agar dapat membatasi kekuasaan. Karena jika ditilik dari segi historis banyak praktik penyalahgunaan kekuasaan, sehingga adanya konstitusi adalah sebagai reaksi nyata agar hak-hak warga negara yang telah dijamin dapat terlindungi dari berbagai kekuasaan yang ada dalam suatu negara. maka dari perspektif inilah, konstitusi memiliki makna yang lebih dalam dari hanya sekedar dokumen melainkan juga sebagai pembatas kekuasaan sebagai wujud paham

konstitusionalisme. Erict Barent menyatakan bahwa *“constitutionalism is a belief in omposition of restrains on governance by mean a constitution”*(1998:3), yang dapat dimaknai bahwa konstitusionalisme kepercayaan pada komposisi pembatasan pemerintahan dengan cara yang telah diatur konstitusi

Konstitusi sebagai pembatas kekuasaan juga dapat dipahami dari tiga pengertian pokok yang disampaikan oleh C.J Bax dan G.F.M van der Tang (1993:88), yaitu:

- a. Negara, atau sistem pemerintahan apa pun, harus didirikan berdasarkan hukum, sementara kekuasaan yang dijalankan di dalam negara harus sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang pasti.
- b. Struktur kelembagaan pemerintah harus memastikan bahwa kekuasaan berada dengan, atau dibagi di antara, cabang-cabang yang berbeda yang saling mengendalikan pelaksanaan kekuasaan mereka dan yang berkewajiban untuk bekerja sama.
- c. Hubungan antara pemerintah dan anggota individu masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar dan kebebasan yang terakhir tidak terganggu.

Salah satu makna terkait fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan ialah bahwa negara harus menjamin terlindunginya hak-hak dasar warga negara, sehingga negara pun dilarang untuk melanggar hak tersebut. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas diaturnya HAM dalam hukum tertinggi yaitu konstitusi. Karena terdapat dua konsep dalam paham konstitusionalisme yaitu konsep negara hukum yang bertujuan hukum harus diatas kekuasaan dan politik, seta konsep hak warga negara yang berarti warga negara mendapat jaminan kebebasan dari konstitusi.(Soetandyo Wignjosoebroto, 2002:405). Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi paham konstitusionalisme dari sudut pandang pembentukan konstitusi sebagai hasil resultante substansi HAM

adalah substansi utama dalam konstitusi. Oleh karena memenuhi dan melindungi HAM adalah domain dari negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat dalam konsep kedaulatan rakyat.(George H. Sabine, 1961:517-596). Menurut Bagir Manan di tingkat inilah dapat dilihat fungsi dari eksistensi konstitusi adalah jaminan perlindungan dan pemajuan HAM sebagai benuk pembatas bagi kekuasaan negara.(1997:45).

2. Raison D'Etre Pengujian Undang- Undang dan Mahkamah konstitusi

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kasus *Madison vs Marbury* di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen UUD 1945 merupakan hal yang secara historis menjadi awal mula adanya MK di Indonesia.

Dan dalam konteks pengujian undang- undang terhadap UUD pun pada dasarnya pertama kali muncul di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan judicial review, Supreme Court Amerika Serikat, dimana Chief Justice John Marshall dengan empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan Supreme Court untuk mengeluarkan Writ of Mandamus pada Pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga Supreme Court menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Namun, di sisi lain juga dinyatakan

bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya.

Hans Kelsen (1881-1973) pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna memperkenalkan MK sebagai lembaga yang ada didalam suatu negara. (Jurnal *Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2004 :3). Kelsen menyatakan bahwa perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court* guna menilai efektifitas pelaksanaan aturan yang ada dalam konstitusi dengan menjamin organ pembentuk undang-undang dalam membuat suatu prosuk hukum harus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Maka atas dasar hal tersebutlah pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshof* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.

Momen berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. (Bagir Manan, 2001:32). Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai

hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam UUD 1945.

Pembentukan MK sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD NRI 1945. Dalam negara hukum harus ada paham konstitusionalisme, di mana tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.(Beni K. Harman & Hendardi (Ed), 1991,:40-41.) Untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah memberikan wewenang atau hak uji materil kepada lembaga kekuasaan kehakiman. Apabila warga negara, baik perorangan maupun komunitas atau badan hukum yang merasa atau menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang, mereka dapat mengajukan pengujian atas undang-undang yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi.(MPR RI, 2001:153). Khusus untuk perorangan warga negara dan kesatuan masyarakat hukum adat, mekanisme uji materil juga ditujukan untuk menjamin terlindunginya HAM yang dijamin UUD 1945.

3. Urgensi Perlindungan Hak Memilih Dan Dipilih oleh Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya HAM dan demokrasi memiliki hubungan keterkaitan, dimana demokrasi memberikan pengakuan atas keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik pulalah yang mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan sehingga menjadi tujuan dari demokrasi itu sendiri (<http://digilib.unila.ac.id/9849/5/4.PEMBAHASAN.pdf> , diakses tanggal 7 November 2018 Pukul 15.30 WIB). Pelaksanaan secara nyata peran publik dalam konteks pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan

pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Majda El Muhtaj, 2008: 45.). Hal ini sesuai dengan pernyataan Ronald Dworkin “*one of the core premises of the ideational story is that a “mature democracy,” must protect itself from the tyranny of the majority through judicial protection of rights provisions that protect vulnerable groups and individuals*”(*Journal of Law, Economics, and Organization*, *Forthcoming*:2013:7). UUD NRI 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan atas Hak memilih dan dipilih, pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan: bagaimanakah memberikan jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar?. Pelanggaran HAM secara umum didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termuat dalam konstitusi dan instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. (*Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3 Tahun 2014: hlm.20). Sebagaimana dikemukakan Soehino (2010: 139-140) bahwa secara hakiki dan mendasar, sistem demokrasi merupakan sistem pengikutsertaan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Sedangkan implementasi sistem demokrasi itu sendiri adalah pemilihan umum. Dengan demikian, maka pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi langsung harus benar-benar memberi ruang secara penuh bagi keterlibatan rakyat dalam rangka menentukan siapa yang layak menjadi pemimpinnya. Hal ini perlu dipertegas demi masa depan dan peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri.

Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, maka negara bersangkutan dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*act by commission*). Kedua, terjadi karena kelalaiannya sendiri (*act by omission*). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui

kebijakan yang dibuatnya. Dalam konteks hak memilih dan dipilih menjadi penting untuk dilindungi karena hak yang dilindungi secara konstitusional melalui UUD 1945 ini tetap akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan tertentu, terutama terkait dengan kepentingan politik jangka pendek pembentuk undang-undang. Terkait kekawatiran tersebut *Jeremy Waldron dalam The Dignity of Legislation* (1999:1) menegaskan *that legislation and legislatures have a bad name in legal and political philosophy, a name sufficiently disreputable to cast doubt on their credentials as respectable source of law*. Khusus terkait pelanggaran dalam bentuk kelalaian, berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan negara berpeluang besar untuk itu. Peraturan perundang-undang yang dibuat baik oleh DPR dan pemerintah (berupa undang-undang), maupun tidak selalu responsif terhadap hak pilih itu sendiri. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggaran atas hak pilih.

Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpeluang menjadi senjata yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih juga merupakan gerbang bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Oleh karenanya, memperbincangkan hak pilih tidak terlepas dari dua dimensi, yaitu hak memilih dan hak untuk dipilih. Begitu pentingnya makna perlindungan hak pilih membuat banyak negara demokratis di dunia mencantumkannya sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya (Bisariyadi, 2017:5). Maka atas hal tersebutlah UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa hak pilihnya dilanggar untuk mengujinya melalui mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD NRI 1945

peluang untuk mengajukan *judicial review* diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1).

Mekanisme *judicial review* atas hak pilih yang terlanggar secara potensial maupun aktua tidak lain adalah untuk menjamin keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu adanya pengujian undang-undang menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) pembentuk undang-undang ketika membahas rancangan undang-undang. (Saldi Isra, 2010:311). Artinya apabila terdapat pengujian undang-undang yang wujudnya konkretnya berupa putusan MK yang sifatnya melindungi tentu akan berimplikasi positif pada kehati-hatian legislatif dalam membuat suatu produk UU yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih. Sebab, hak *judicial review* yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengontrol kekuasaan legislatif, Presiden dan DPD. (Denny Indrayana, 2007:385). Selain itu, yang jauh lebih penting adalah menjaga agar produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pilih tidak menyimpang dari UUD NRI 1945 dan secara otomatis pula terlindunginya hak pilih yang dijamin UUD NRI 1945. Sehingga disini kita dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ternyata mempunyai peran yang penting pula dalam konteks perlindungan hak memilih dan dipilih. Karena putusan mk yang memiliki sifat mengikat secara umum dan MK juga mempunyai posisi yang sentral karena dapat membatalkan undang-undang atau tidak. Oleh karena itu, adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD merupakan satu keniscayaan untuk memulihkan hak-hak politik warga negara, utamanya hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak dipilih (*right to be candidate*). Jarum sejarah dua belas tahun perjalanan Mahkamah Konstitusi telah menunjukan bahwa lembaga ini memiliki andil dan kontribusi penting dalam menentukan arah dan jalan pembangunan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya yang seringkali diposisikan sebagai: (1) pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (2) penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*); (3) pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*); (4) pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); dan (5) pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). (Pan Mohammad Faiz, 2009:2). Apabila hak pilih tersebut dilanggar dalam norma suatu UU yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, jalan terakhir untuk mempertahankan hak nya dari kesewenang-wenangan penguasa adalah melalui penngujian undang-undang ini, sehingga implikasinya adalah adanya putusan MK yang dapat menjadi instrumen guna memberikan perlindungan atas hak pilih tersebut karena hak pilih merupakan wujud nyata adanya demokrasi sebagaimana yang dianut di Indonesia. Karena demokrasi merupakan gagasan bermasyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan) yang tertinggi, artinya demokrasi prosedural yang dilakukan melalui hak memilih dan dipilih oleh seorang Warga Negara harus benar-benar terjamin perlindungannya, dan MK menjadi lembaga yang eksistensinya penting untuk melaksanakan hal tersebut, karena tujuan adanya MK tidak lain adalah pengwal konstitusi dan demokrasi dan sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara, mengingat Agus Riewanto pernah mengemukakan bahwa “Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara” (<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/88124/> melindungi-hak-pilih, diakses pada 1 Maret 2019).

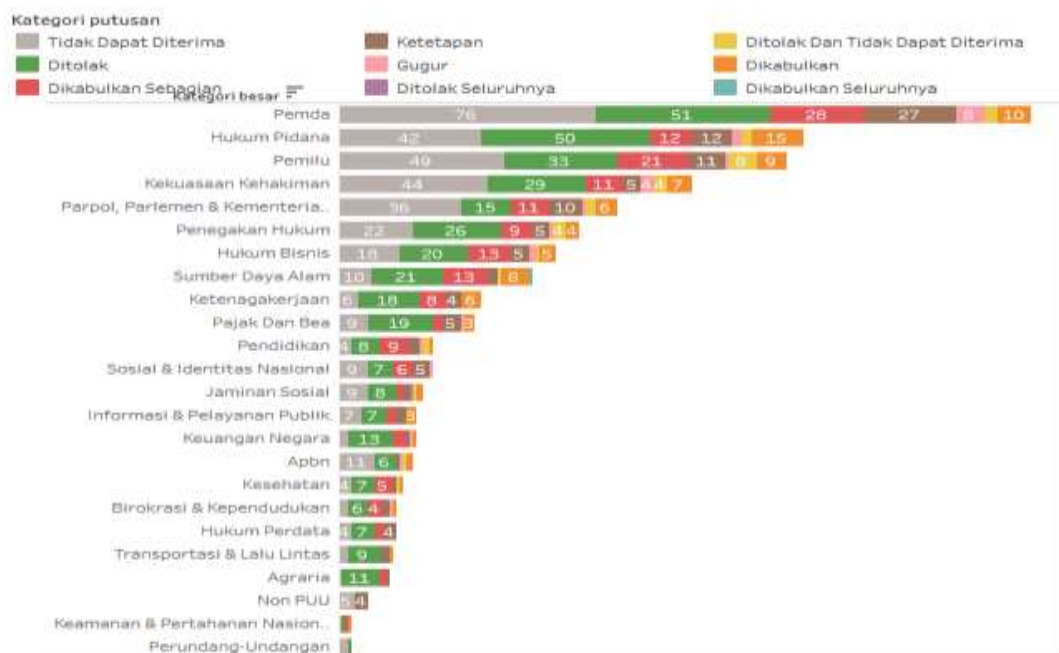
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2018 dalam melindungi Hak Memilih dan Dipilih

Robert Dahl dalam Miriam Budiardjo (2008:109) mengemukakan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik dan bagaimana suatu pemerintahan disebut demokratis. Pertama, berjalannya pemerintahan suatu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya konstitusi, hak asasi manusia, undang - undang, dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak. Kedua, berjalannya roda pemerintahan berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. Ketiga, adanya pemilihan umum (pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih. Keempat, adanya prinsip mayoritas, yaitu disahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. Kelima, adanya jaminan terhadap hak - hak demokratis masyarakat sipil dalam keseluruhan bidang yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Dari beberapa hal yang diungkapkan oleh Dahl tersebut, poin penting yang dapat diambil terkait demokrasi prosedural dalam pemilu adalah pada pernyataan pertama dan kedua. Demokrasi prosedural disini memiliki kaitan yang erat terhadap pemilihan umum. Dahl berpendapat ada tujuh prinsip mendasar sebuah negara bisa disebut demokratis atau tidak. Prinsip tersebut meliputi pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan adil, hak pilih mencakup semua orang, hak untuk dipilih atau menjadi calon suatu jabatan, kebebasan mengungkapkan pendapat diri baik secara lisan maupun tulisan, adanya informasi alternatif, dan adanya kebebasan untuk membentuk asosiasi. Demokrasi merupakan gagasan bermasyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan). Robert Dahl menyatakan “...*there is no democratic theory...there are only democratic theories.*” Demokrasi merupakan integrasi dari gagasan, prosedur dan praktik yang saling bersinergi satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi pengujian UU terhadap UUD menjadi jalan terakhir bagi warga negara untuk dapat mengajukan permohonan terhadap produk yang dibuat oleh legislatif yaitu undang-undang. Isu terkait hak politik menjadi isu yang paling sering diajukan dalam *judicial review* di MK. UU Pemda dan UU pemilu menjadi 3 besar yang paling sering diujikan di MK, dimana isu hak memilih dan dipilih menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia.

Gambar 1.1
Tabel pengujian undang-undang di MK



Sumber: <http://defacto.id/edisi01.html>, diakses pada 2 Maret 2019 pukul 21.00 WIB

Dari tabel diatas kita dapat melihat frekuensi pengujian undang-undang di atas dapat terlihat bahwa dari sisi kuantitatif, undang-undang di bidang pemilihan umum memperoleh perhatian yang cukup besar karena memiliki kepentingan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas,

baik sebagai pemilih maupun peserta pemilu. Terdapat pengujian konstiusionalitas terhadap beberapa jenis undang-undang yang masih terkait erat dengan penyelenggaraan Pemilu, namun tidak masuk kategori undang-undang di bidang Pemilu. Misalnya, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan pemilihan umum sering diajukan ke MK untuk diuji konstiusionalitasnya. Sedangkan secara kualitatif, putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK dalam pengujian undang-undang, baik di bidang pemilihan umum ataupun bidang lainnya, pada dasarnya adalah untuk melindungi hak konstiusional (*constitutional rights*) dan hak asasi manusia (*human rights*), (*Indonesia Law Review*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2016:162 – 176), serta prinsip-prinsip demokrasi (*principles of democracy*) yang sangat penting bagi tumbuh dan tegaknya demokrasi. (*Journal of East Asian Studies*, Volume 10, Issue 3: 416 – 417.)

Dari beberapa permohonan yang telah dikabulkan oleh MK, penulis telah mengekstraksi beberapa putusan yang hanya berkaitan dengan hak memilih dan dipilih yaitu:

1. Hak Memilih

NO	PUTUSAN	TENTANG	INTI PUTUSAN
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Diperbolehkannya penggunaan kartu identitas dalam pemilu presiden apabila tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.

2.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/2015	Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	MK memutuskan bahwa frasa “terganggu jiwa/ ingatannya” harus dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”. Artinya, penderita gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang tidak permanen masih harus didaftarkan sebagai pemilih
3	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012	Pengujian Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Diperbolehkannya penggunaan kartu identitas dalam pemilihak kepala daerah apabila tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap.

Penulis akan menganalisis satu persatu dari ketiga putusan tersebut apakah memberikan perlindungan hak memilih bagi rakyat Indonesia, namun untuk putusan pertama dan ketiga karena substansi yang diuji sama maka akan dijadikan satu oleh penulis.

1. PUTUSAN MK NOMOR 102/PUU-VII/2009 dan PUTUSAN MK Nomor 85/PUU-X/2012 (penggunaan kartu identitas dalam pemilu presiden dan kepala daerah)

a. Identitas Pemohon

- 1) Pemohon dalam perkara nomor 102/PUU-VII/2009 adalah Refly Harun sebagai pemohon I dan Maheswara Prabandono sebagai Pemohon II.
- 2) Pemohon dalam perkara Nomor 85/PUU-X/2012 adalah Mohammad Umar Halimuddin dan Siti Hidayawati

b. Pokok Permohonan

- 1) Pokok permohonan Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 adalah ketentuan Pasal 28 UU 42/2008 yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.”. Kemudian ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Pilpres yang berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.” Yang terpenting dalam aturan ini ialah seorang warga negara harus terdaftar sebagai pemilih, kategori umur dan sudah kawin tidak cukup untuk mengatakan seseorang dapat memilih karena apabila nama seseorang tersebut yang tidak tercantum dalam daftar pemilih maka secara otomatis akan kehilangan hak memilihnya. Padahal Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.” , dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu yang mempunyai kewajiban untuk mendaftar semua warga negara yang memiliki hak memilih (*eligible voters*). Perihal akan menggunakan hak memilihnya atau tidak pada hari pemungutan suara menjadi tanggung jawab dan urusan dari hak warga negara yang bersangkutan. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 sekurang-kurangnya memiliki potensi yang cukup besar dalam menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal jika ditilik lebih lanjut hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana amanah MK dalam putusannya Nomor 011-017/PUU-I/2003. Putusan tersebut menyebutkan, “bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

- 2) Pokok Permohonan **perkara Nomor 85/PUU-X/2012 adalah** ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” yang jika diartikan berarti warga negara harus terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam daftar pemilih baru dapat menggunakan haknya untuk memilih dalam suatu pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu saja menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Sehingga Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

c. Amar Putusan

- 1) Amar Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 ialah Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat sebagai berikut: 1) Selain warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi warga Negara Indonesia yang berada di luar Negeri; 2) Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau sejenisnya; 3) Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTPnya; 4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPSS setempat; 5) Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum adanya pemilu.

- 2) Amar putusan perkara Nomor 85/PUU-X/2012 Mengabulkan sebagian, khususnya terkait dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

- 1) Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008 berbunyi, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih” dan Pasal 28 UU 42/2008

menyatakan “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi. Pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui legislative review pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya.

- 2) Pertimbangan hukum dalam perkara **perkara Nomor 85/PUU-X/2012** Mahkamah perlu merujuk Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, yang pada halaman 35 menyatakan, “... bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara a quo adalah berbeda dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 102/PUUVII/ 2009 tentang Permohonan Pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi secara substansi kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang pada prinsipnya sama yaitu mengenai hak seseorang untuk memilih (right to vote), sehingga pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUUVII/ 2009 bertanggal 6 Juli 2009 tersebut mutatis mutandis berlaku pula dalam perkara a quo;

e. Analisis

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, yaitu pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat dan cara yang diatur. Putusan MK tersebut bisa dikatakan sebagai kemenangan demokrasi dan wujud penguatan Hak Asasi Manusia (HAM), karena apabila tidak adanya putusan tersebut, rakyat akan kehilangan hak suaranya

karena tidak masuk dalam DPT. Komnas HAM sudah mengingatkan bahwa jutaan orang yang dengan sengaja tidak bisa menggunakan hak politiknya itu sebagai pelanggaran HAM berat. (*Jurnal Konstitusi* , Volume 6, Nomor 3, September 2009:89).

Penggunaan KTP bagi warga negara Indonesia di wilayah Indonesia dan paspor bagi warga negara Indonesia di luar negeri merupakan penghilangan diskriminasi terhadap warga negara dalam menegakkan hukum dan memberikan kesempatan untuk aktif dalam urusan pemerintahan dengan syarat-syarat yang berlaku sama bagi setiap orang. (*Jurnal Konstitusi* , Volume 6, Nomor 3, September 2009:90). Dengan demikian, Negara Indonesia telah menjunjung tinggi demokrasi dan hukum. Sebagaimana menurut A. V. Dicey, dalam Negara Hukum (*rule of law*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang; 1. Persamaan kedudukan di muka hukum (2. equality before the law); Supremasi aturan-aturan hukum (3. supremacy of the law) dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. (Masyhur Effendy, 2005:42).

Lebih lanjut, putusan MK tersebut telah memenuhi unsur-unsur negara hukum menurut A. V. Dicey, yaitu dengan dijaminnya hak asasi warga yang tidak termasuk dalam KTP dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sepanjang diartikan sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara yang ditentukan MK. Mengenai persamaan kedudukan di muka hukum juga terpenuhi, buktinya dengan putusan tersebut telah menghilangkan diskriminasi hak warga yang tercantum dalam DPT dan yang tidak tercantum dalam DPT. Sedangkan supremasi dan aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas juga terpenuhi, seperti segala hal tentang pemilu diatur oleh hukum, dalam hal ini dengan dikeluarkannya peraturan KPU sebagai

pengaturan teknis pemilu pasca putusan MK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan MK tersebut merupakan perwujudan dalam upaya perlindungan dan menghormati HAM dan persamaan kedudukan dalam pemerintahan sehingga warga negara mendapat tempat yang sama sebagai pendukung hak dan kewajiban.(*Jurnal Konstitusi* , Volume 6, Nomor 3, September 2009:91).

Sejak pertama kali diimplementasikan Penerapan terhadap putusan MK tersebut berdampak positif pada semakin kuatnya hak konstitusional warga yang sebelumnya masih terhalang oleh Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Pilpres, misalnya di Balikpapan, Lampung Utara, Sebanyak 536 warga yang tersebar di 17 kecamatan dan 757 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).(Radar Kota Bumi, http://www.radarkotabumi.com/mod.php?mod=publisher&op=view_article&cid=7&artid=9181 diakses pada).

Menurut hasil penelitian Rizqi Budi Sutrisno (2013:156) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009 Tentang Penggunaan Ktp Dan Paspur Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden dengan adanya putusan ini, telah mengembalikan hak-hak konstitusi warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Beberapa implikasi yang timbul setelah adanya putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

1. Semakin kuatnya hak warga negara Indonesia sebagai wujud dari Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Putusan MK tersebut kemungkinan besar akan diadposi oleh DPR untuk dimasukkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, melalui amandemen Undang-Undang atau Undang-Undang Pemilu untuk lima tahun ke depan.
3. Dapat mengurangi terjadinya perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden antarpeserta pemilu presiden mengenai masalah DPT dan KTP yang berhubungan dengan putusan MK tersebut.
4. Setelah dibacakan putusan MK tersebut, KPU akan bertindak ekstra, mengingat pelaksanaan pemungutan suara tinggal dua hari, sehingga KPU harus memaksimalkan waktu dua hari tersebut untuk menjaga profesionalitas KPU.
5. Pada pemilu berikutnya dimungkinkan penggunaan DPT ditiadakan, sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP, sehingga pemilu menjadi lebih efektif dan menjamin hak konstitusional warga yang berakibat meningkatkan taraf demokrasi di Indonesia.
6. Hak konstitusional warga yang tidak masuk dalam DPT telah hilang pada pemilu legislatif, maka pada pemilu presiden telah dikuatkan berkat putusan MK tersebut.
7. Warga yang tidak mempunyai KTP akan ditindak lanjuti oleh pemerintah, sehingga jika pada pemilu mendatang menggunakan tidak lagi menggunakan DPT tetapi KTP, maka akan mewujudkan pemilu yang lebih demokratis.
8. Memacu kesadaran warga akan berkonstitusi, yaitu apabila warga merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya suatu Undang- Undang, maka warga dapat mengajukan judicial review ke MK, sehingga peran MK

dalam proses demokratisasi sejalan dengan kesadaran berkonstitusi warga.

9. Putusan MK tersebut menjadi yurisprudensi ketika nantinya terdapat permasalahan tentang DPT, seperti pada pemilukada, dan sebagainya.

10. Semakin menguatkan mekanisme checks and balances antara MK dan KPU, yang mana Indonesia sudah menuju ketatanegaraan modern, checks and balances tidak hanya dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif karena tidak lagi mampu menjawab kompleksitas, tetapi dengan komisi independen, karena KPU sebagai organ konstitusi.

Bila kemudian dianalisis lebih dalam, maka apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas cukup selaras dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara demokrasi yang sesungguhnya. Karena bagaimanapun harus diakui bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah aspek pendukung yang cukup kuat. Pertama, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, maka peran serta rakyat dalam proses demokrasi akan dapat direalisasikan secara langsung. Rakyat akan langsung menentukan pilihan terkait siapa sosok pemimpin yang dinilai layak mengemban tampuk kekuasaan. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki aspek objektivitas yang lebih kuat. Ketika rakyat terlibat langsung dalam proses pemilihan, maka sisi objektivitas suatu proses demokrasi akan dapat lebih dipertanggungjawabkan, khususnya bila dibandingkan dengan sistem pemilihan lewat lembaga perwakilan yang sarat dengan nuansa kepentingan politik dan lebih cenderung subjektif. Ketiga, proses pemilihan secara langsung akan berdampak pada proses pematangan demokrasi itu sendiri. Demokrasi suatu negara diyakini akan matang dan mapan ketika keterlibatan rakyat dalam

proses demokrasi itu sendiri dilakukan secara langsung. Karena bagaimanapun, dalam alam demokrasi, rakyatlah yang memegang kunci sentral sebagaimana hakikat demokrasi itu sendiri, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung, potensi terjadinya politik uang akan dapat diminimalisir, paling tidak untuk tahapan demokrasi di masa yang akan datang, yaitu setelah rakyat benarbenar matang dan teruji dengan proses demokrasi itu sendiri. Walaupun fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa proses demokrasi langsung terkesan diwarnai dengan sejumlah kasus politik uang, seyogianya kondisi dimaksud dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi menuju proses pematangan demokrasi itu sendiri. Keempat, proses pemilihan secara langsung memberikan ruang baru bagi rakyat untuk melakukan kontrol langsung atas kinerja pemerintah yang sedang berkuasa melalui *people power*. Kalau kemudian rakyat menganggap bahwa pemerintah yang sedang berkuasa telah melanggar kepatutan yang melukai hati rakyat dan mengingkari “kontrak politik”, maka bukan tidak mungkin bahwa rakyat akan mencabut mandatnya melalui *people power* (At Thoriq, 2008: 131).

Atas dasar itu, maka putusan MK kali ini patut dimaknai sebagai suatu terobosan penting dalam rangka menjaga dan menegakkan hak konstitusional warga negara. Putusan dimaksud juga merupakan konsekuensi yuridis atas keberadaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang telah memilih sistem demokrasi, khususnya demokrasi langsung sebagai konsep bernegara yang patut direalisasikan saat ini. (*Jurnal Komisi Yudisial* Vol.6 No.2 2013: 137-138) Sistem demokrasi yang kita anut sebagaimana digariskan dalam konstitusi bukanlah sebuah istilah yang hanya akan dipajang sebatas naskah di atas kertas semata, namun harus diwujudkannyatakan dengan baik. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan

untuk mengekang hak politik warga negara dengan dalih mengatur mekanisme demokrasi melalui sejumlah regulasi yang justru menjadi penghambat penyaluran aspirasi bagi pemilih.

Selain itu, alasan memilih konsep demokrasi dalam berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia bukanlah lahir dari konsep yang mengada-ada. Pemilihan konsep demokrasi bagi bangsa ini lahir dari pertimbangan bahwa tercatat begitu banyak negara yang berhasil membangun negerinya dengan konsep dan landasan serta sistem demokrasi. Sistem demokrasi juga dianggap lebih relevan dalam rangka membangun dan mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan, sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, upaya penguatan proses demokrasi perlu dilakukan dengan menghilangkan berbagai prosedur dan mekanisme yang terkesan justru menjadi penghalang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara utuh dalam setiap proses demokrasi, baik demokrasi tingkat nasional maupun lokal.

Sebagaimana dikemukakan Soehino (2010: 139-140) bahwa secara hakiki dan mendasar, sistem demokrasi merupakan sistem pengikutsertaan rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Sedangkan implementasi sistem demokrasi itu sendiri adalah pemilihan umum. Dengan demikian, maka pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi langsung harus benar-benar memberi ruang secara penuh bagi keterlibatan rakyat dalam rangka menentukan siapa yang layak menjadi pemimpinnya. Hal ini perlu dipertegas demi masa depan dan peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri.

Sehingga Putusan MK ini bahwa pengaturan dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri telah mengembalikan hak-hak konstitusi

warga negara yang kehilangan hak-haknya untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jelas bahwa putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak memilih dari warga negara.

2. Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 (orang dengan gangguan jiwa/ingatan yang tidak permanen boleh mengikuti pemilu)

a. Identitas Pemohon

Perhimpunan Jiwa Sehat sebagai Pemohon I, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) sebagai Pemohon II, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon III, dan Khorunnisa Nur Agustyati sebagai Pemohon ke IV.

b. Pokok Permohonan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memuat ketentuan Pasal 57 ayat (3) “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” juga telah menghilangkan

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara. Selain itu, di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Hal ini menyebabkan tidak akan didaftarnya sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikuatirkan para Pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstitusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya.

c. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
 - a) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;

- b) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;
- c) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu

dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam. Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, Undang-Undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih. DPR dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam memaknai frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Pasal 148 UU 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 3. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat

menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.” Adapun Pasal 148 UU Kesehatan menyatakan bahwa, “(1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain.”

UU Kesehatan Jiwa juncto Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih. Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

e. Analisis

HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Knut D. Asplund, 2009 : 11) jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.. Dalam ketatanegaraan Indonesia pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logisnya ialah bahwa pemilik kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat).yang diwujudkan dengan pemilu. Penyelenggaraan pemilu didesain sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan wakil rakyat dalam pemerintahan dan kebijakan publik.

Munculnya pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menimbulkan problematika baru dimana melarang penderita gangguan mental ikut serta dalam pilkada. Yang kemudian pasal tersebut dinyatakan inkonsistensial oleh MK melalui putusan nomor 135/PUU-XII/2015. Menurut Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa (PPDGJ), Tiap gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap 'normal' untuk fungsi otak yg lain. Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Pun mereka sejatinya juga memiliki hak (keinginan) untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional. (<http://ners.unair.ac.id/materikuliah/buku%20ajar%20keperawatan%20kesehatan%20jiwa.pdf>, diakses pada 19 April 2019 Pukul 13.38 WIB)

Perlu dipahami bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, dimana Pasal 27 UUD 1945, Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas *agar hak-hak politiknya terpenuhi*. Pasal 29 dari konvensi ini menuntut Negara untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas secara efektif dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dengan menjamin hak pilihnya. Pasal 29 tidak melihat adanya pembatasan yang bisa dibenarkan, juga tidak mengizinkan adanya pengecualian untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu. Oleh karena itu, pengecualian hak untuk memilih atas dasar disabilitas mental (gangguan jiwa), baik yang sekedar dugaan maupun yang aktual, termasuk pembatasan berdasarkan penilaian individual, merupakan diskriminasi atas dasar kecacatan. Sehingga sudah menjadi konsekuensi bagi negara untuk melindungi hak-hak WN nya. Meniadakan hak pilih yang dimiliki penyandang disabilitas mental merupakan pencideraan terhadap nilai pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Yang dimaksud keadilan disini adalah bahwa odgm juga bagian dari rakyat dan ingin menyuarakan pilihannya.

Dalam kenyataannya, hingga saat ini penyandang disabilitas menjadi kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka (Zainul Daulay, 2013: 1).

Ronald Clive McCallum dalam sidang mahkamah konstitusi juga mengemukakan bahwa terdapat Kasus Alajos Kiss v Hungary yang ditangani Komisi Eropa untuk HAM pada Mei 2010. UU Hongaria menyatakan bahwa seseorang yang berada di bawah perwalian akan

kehilangan hak pilihnya. Mahkamah Hongaria menyatakan ketentuan demikian bertentangan dengan demokrasi. Paragraf 44 putusan a quo menyatakan kesimpulan Mahkamah Eropa untuk HAM bahwa penghapusan hak pilih secara semena-mena, tanpa evaluasi peradilan secara individual, dan semata-mata hanya karena disabilitas mental yang karenanya membutuhkan perwalian, adalah hal yang tidak selaras dengan alasan sah untuk membatasi hak pilih. Pemerintah Hongaria, setelah kasus Kees, mengubah Undang-Undanganya dan mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah perwalian harus membuktikan di hadapan pengadilan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memberikan suaranya dalam pemulihan umum. Hal ini diadukan kepada Komisi Eropa Untuk HAM dan dikenal sebagai Kasus Zsolt v Hungary. Komisi Eropa Untuk HAM memutuskan Undang-Undang yang baru tersebut tidak sah karena mensyaratkan orang dengan disabilitas untuk membuktikan terlebih dahulu kemampuannya memilih. Kemudian juga kasus ibu Nagoya di Jepang mengidap *down syndrome* memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari namun kesulitan mengambil keputusan mengenai properti yang dimilikinya. Sebelum ada UU yang menempatkan orang-orang dengan gangguan mental sebagai orang di bawah perwalian (*koken*) dia sudah mengikuti Pemilu selama 30 tahun, namun setelah ada aturan UU tersebut, hak pilihnya hilang. Putusan PN Tokyo menyatakan UU tersebut melanggar hak.

Selain itu, merujuk pada prinsip keadilan sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan pemilu, maka hak-hak penderita gangguan mental haruslah diakomodir agar nafas keadilan dari pemilu itu sendiri dapat terwujud. Ramlan Surbakti (Harian Kompas edisi 14 Februari 2014:6) mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas dimana poin pertama dan utamanya merujuk pada adanya terwujudnya kesetaraan antar warga negara baik dalam hal memilih dan dipilih dalam pemilu

agar terlaksana kontestasi yang bebas dan adil. Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu inilah yang secara inheren harus dilindungi dengan tidak membatasi atau mencabut hak memilih bagi penderita gangguan mental.

Berdasarkan studi perbandingan yang diteliti oleh *Thomson Reuters Foundation* mengenai legislasi terkait dengan penyandang disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 2015, menyatakan bahwa 10 dari 11 negara yang diteliti tidak memperbolehkan adanya pembatasan dalam hak memilih dan dipilih, kecuali bila ada penetapan secara individual oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi gangguan mental tidak bisa disamaratakan dan dijadikan alasan objektif untuk pembatasan hak pilihnya. Berdasarkan pengaturan dalam putusan MK sebelumnya, yakni putusan No.011-017/PUU-01/2003, dimana persoalan pembatasan hak pilih dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat individual dan tidak kolektif; Selain itu dalam putusan MK No.08/PUU-II/2004, dimana MK bahkan menegaskan bahwa pada pembatasan-pembatasan terhadap mereka yang menderita cacat sekalipun tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka terhalang pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Artinya adanya putusan MK ini secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap hak memilih dari orang yang mempunyai gangguan mental itu sendiri, karena pembatasan tersebut tidak dilakukan atas pertimbangan moral, agama maupun ketertiban umum.

2. Hak Dipilih

NO	PUTUSAN	TENTANG	INTI PUTUSAN
1	Putusan MK Nomor 011 – 017/PUU-I/2003	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Diperbolehkannya kembali larangam menjadi anggota legislatif bagi bekas anggota organisasi terlarang PKI, organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung atau tidak langsung sdalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya
2	Putusan MK No.005 / PUU/ III / 2005	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945.	Menegasikan uu pemda yang menjelaskan hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, karena partai politik tersebut berhasil memperoleh dukungan rakyat secara signifikan,

			karenanya merekalah wakil rakyat dan juga kepanjangan tangan partai politik yang secara sah mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan.
3	Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007	Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Diperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.
4	Putusan Mk Nomor 22-24/Puu-Vi/2008	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang	Penentuan calon anggota DPR, DPD dan DPRD terpilih berdasarkan suara terbanyak

		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
5	Putusan MK Nomor 04/PUU- VII/2009	Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	MK menyatakan ketentuan syarat tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>).
6	Putusan MK Nomor 42/PUU- XIII/2015	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan	sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

		Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang	
7	Putusan MK Nomor 33/PUU- XIII/2015	Pengujian Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Diperbolehkannya keluarga petahana untuk mencalonkan sebagai calon Kepala Daerah.

		Tahun 1945	
8	Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016	pengujian undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh	Dikecualikan sepanjang mengumumkan terbuka secara umum.
9	Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016	pengujian UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang	tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun/lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
10	Putusan MK No: 30/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	Frasa“pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7

		tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
--	--	--	--

1. Putusan MK No.011-017/PUU-1/2003 (Diperbolehkannya kembali larangam menjadi anggota legislatif bagi eks-PKI, organisasi massanya, atau orang yang terlibat langsung atau tidak langsung sdalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya)

a. Identitas Pemohon

Pemohon I ialah Deliar Noer, dkk serta Pemohon Ke II adalah Sumaun Utomo, dkk.

b. Pokok Permohonan

Ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30. S/PKI atau organisasi terlarang lainnya", dimana ketentuan pasal tersebut yang menjadi pokok permohonan dalam perkara kali ini menurut pemohon telah melanggar hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam UUD NRI 1945 disebabkan perlakuan yang diskriminatif akibat suatu keyakinan politik semata. Karena apabila ketentuan tersebut dibiarkan dan dilaksanakan (*enforced*) justru akan semakin melanggengkan stigmatisasi terhadap sekelompok orang, yang

dalam hal ini artinya justru menghentikan upaya untuk untuk memperatukan bangsa yang menjadi tujuan dari adanya reformasi.

c. Amar Putusan

Menyatakan pasal 60 huruf g bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyatakan pasal 60 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat bahwa UUD NRI 1945 melarang segala bentuk perlakuan yang tidak setara yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan konstitusi dan UU HAM itu tidak membenarkan adanya perlakuan yang sifatnya diskriminatif berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, keyakinan politik, dll. Pembatasan hanya dapat dilakukan apabila ditujukan guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, tetapi pembatasan hak dipilih yang diatur dalam ketentuan UU tersebut hanya menggunakan pertimbangan politis semata.

Mahkamah juga berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mencantumkan dengan jelas bahwa setiap warganegara dalam hukum dan pemerintahan memiliki kedudukan yang sama dengan tidak ada kecualinya talah menunjukkan pada kita semua bahwa hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945, serta UU dan juga dalam aturan universal melalui konvensi internasional. Sehingga pembatasan

dalam UU ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

Mahkamah juga berpendapat bahwa ketentuan yang diujikan dalam UU ini yang membatasi hak pilih dan dipilih hanyalah menggunakan pertimbangan politis semata tanpa mempertimbangkan segi HAM dan hukum. Lazimnya dalam pemilu persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) hanya di dasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia, dan keadaan jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Mahkamah juga berpendapat ketentuan yang diujikan dalam UU tersebut sangat terang tujuannya adalah bernuansa hukuman politik untuk kelompok tertentu. Padahal sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang berkaitan dengan hak dan kebebasan warga negara harus mempunyai landasan hukum yang tepat yaitu melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Mahkamah juga berpendapat suatu tanggungjawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (*dader*) atau yang turut serta (*mededader*) atau yang membantu (*medeplichtige*), maka ketentuan dalam pasal tersebut jelas merupakan bentuk konkret dari perlakuan yang bertentangan dengan tujuan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri, karena tanggung jawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung.

e. Analisis

Putusan MK No.011-017/PUU-1/2003 yang secara spesifik adalah tentang Larangam menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi bekas anggota organisasi terlarang PKI, organisasi massanya, atau orang yang terlibat

langsung atau tidak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya telah memberikan perlindungan terhadap hak dipilih. Hal ini didasarkan atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyebutkan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya serta berhak untuk dijamin pemenuhan dan perlindungannya dari berbagai perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, yang sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan:

1. *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
2. *Everyone has the right of equal access to public service in his country.*
3. *The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Selain itu, dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991 yakni tepatnya *Article 25 tentang Civil and Political Rights* menyebutkan bahwa:

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot,

guaranteeing the free expression of the will of the electors; To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

UU Pemilu Legislatif telah menghilangkan hak mantan anggota PKI maupun orang yang tidak terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan organisasi terlarang lainnya untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Pihak yang paling dirugikan atas adanya aturan ini adalah anak keturunan mantan anggota PKI, mengapa demikian?, karena jarak pembentukan UU ini dengan peristiwa PKI ini adalah 38 tahun, sedangkan para pelaku yang terlibat baik langsung maupun tidak ternyata paling muda ialah 30 tahun, maka secara logis ketika UU ini dibentuk adalah sekitar berumur 68 tahun. Dalam umur yang sudah demikian sangat kecil pula kemungkinan untuk aktif kembali dalam dunia politik. Oleh karena itu, dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK menegaskan bahwa pemasungan hak politik ini amat kental muatan politisnya. Disisi lain para pelaku G.30.S/PKI dan anggota PKI pada masa orde lama telah ditangkap dan dihukum sebagai tahanan politik dan narapidana politik .(Mochammad Ali syafaat ,2011:198)

Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan melalui undang-undang, tetapi pembatasan harus tetap berdasar alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan, yakni dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan dalam UU tersebut justru hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Menurut Todung Mulya Lubis dalam analisisnya (*Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2004), di negeri ini

pertimbangan politis kebanyakan mengalahkan pertimbangan hukum, HAM dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks UU Pemilu, rumusan Pasal 60 huruf g – membolehkan hak memilih dengan secara paralel memasukkan rumusan kontradiksi antagonis larangan untuk dipilih – lebih didasarkan pada pertimbangan politis. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan betapa hal ini melanggar HAM ialah kasus Svetlana yang seumur hidupnya tidak berani menggunakan nama ayahnya. Svetlana adalah putri Nyoto, Sekjen Central Committee (CC) PKI. Ditinjau dari perspektif HAM, salah satu isu pokok yang berkaitan dengan bekas anggota PKI dan keluarganya adalah problem diskriminasi yang parah. Dengan adanya putusan MK ini, maka salah satu butir diskriminasi dalam lingkup hak memilih dan dipilih dilevel UU Pemilu telah terhapus. Di level internasional kasus Jorge Landinelli Silva, professor sejarah bersama Luis E. Echave Zas, buruh tani; Omar Patron Zebalos, asisten akuntan; Niurka Sala Fernandez, professor fisika dan Rafael Guargo Fero, seorang engineer mengajukan komunikasi kepada CHR pada 30 Mei 1978, yang kemudian melayangkan permohonan kembali ke CHR pada 26 Februari 1981. Kasus telah di eksaminasi oleh *Human Rights Commission*. Menurut Komisi, sesuai dengan Pasal 4(1) Kovenan, memang diperbolehkan negara mengambil tindakan derogasi atas obligasinya. Namun, Komisi berpandangan, walaupun derogasi dimungkinkan, terbatas, hanya *to the extent strictly required by the exigencies of situation*”.

Putusan MK pada dasarnya merupakan deklarasi Negara menjalankan kewajibannya, sesuai dengan standard internasional, amanat Pasal 25 ICCPR. Di level praktik, seharusnya Putusan MK ini menjadi tuntunan bagi pemenuhan hak selain hak dipilih dan memilih dalam Pemilu, yakni hak anggota bekas PKI *“to take part in the conduct of public affairs”* dan *“to have access, on general*

term of equality, to public service". Dalam konteks ini, *Commission on Human Rights* (CHR) menyatakan bahwa pasal ini merupakan dasar bagi sebuah pemerintahan demokratik. CHR berpendapat Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik apapun bentuk konstitusi atau pemerintahan yang berlaku, Kekaisaran mewajibkan Negara untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin dilakukan. diperlukan untuk memastikan warga negara memiliki kesempatan yang efektif untuk menikmati hak-hak yang dilindunginya. "Selanjutnya, CHR menyatakan:" Pelaksanaan urusan publik adalah konsep luas yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan politik, khususnya pelaksanaan legislatif, kekuatan eksekutif dan administratif. Ini mencakup semua aspek administrasi publik, dan perumusan dan implementasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, regional dan lokal.

Hal senada juga disampaikan oleh ahli, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, S.J yang memberi keterangan pada pokoknya bahwa PKI dan organisasi lain termasuk yang disebut langsung maupun tidak langsung terlibat dalam gerakan 30 September dinyatakan terlarang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Bahwa andaikan TAP tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sah, tetapi pelarangan terhadap Anggota PKI untuk memilih dan dipilih tetap tidak berdasar karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sehingga hal yang terpenting dalam putusan tersebut adalah upaya MK dalam menyetarakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia yang juga di jamin dalam konstitusi, putusan ini juga merupakan terobosan untuk menghilangkan diskriminasi yang di tentu bertentangan baik dalam aturan atau norma UUD NRI 1945 maupun instrumen HAM internasional.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal itu memang menghalangi mereka yang selama ini dicap eks-PKI untuk dipilih. Meskipun keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S diyakini banyak kalangan, dan TAP MPRS No. XXV/1966 masih berlaku, bekas anggota PKI harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi. Apalagi dampak dari adanya aturan norma tersebut ialah bagi keturunan seseorang yang dahulunya terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan PKI pada 30 September maupun organisasi terlarang lainnya, padahal mereka sama sekali tidak dapat diperlakukan secara tidak sama dengan warga negara yang lain. Sehingga putusan MK ini jelas memberikan perlindungan hak dipilih

2. PUTUSAN MK No.005 /PUU-III/2005 (pembatalan terkait tidak Hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD yang dapat mencalonkan kepala daerah)

a. Identitas Pemohon

Permohonan ini diajukan oleh Mayjen. Purn. Ferry Tinggogoy,dkk.

b. Pokok Permohonan

Pokok permohonan dalam perkara ini ialah Pasal 59 ayat 1 dan 2 UU PEMDA yang menyebutkan bahwa pasangan calon hanya dapat diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki sekurang-kurangnya 15 % (Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (Lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. Namun penjelasan Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam ketentuan ini adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki

kursi di DPRD. Dengan adanya Penjelasan Pasal 59 ayat 1 tersebut, itu berarti bahwa Pasal 59 ayat 2 yang memberikan kesempatan kepada gabungan Partai Politik yang memiliki 15 % (Lima belas persen) akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sudah dianulir, dengan adanya pengaturan tersebut maka dapat diterka hanya Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh 15 % (Lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD lah yang mungkin untuk dapat mengusulkan calon DPRD. Sehingga menurut pemohon hal ini bertentangan dan telah melanggar UUD NRI 1945

c. Amar Putusan

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat bahwa Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu.. Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

MK berpendapat bahwa hal tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang telah memberikan suara kepada partai politik yang ternyata tidak memiliki wakil di DPRD karena adanya Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) yang mengakibatkan pemilih perseorangan tersebut lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan

tersebut pada dasarnya sudah sesuai amanah UUD NRI 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* pada Pemilu 2004 tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai *electoral threshold* tersebut. Sehingga Pertanyaan Yang muncul adalah apa arti penjelasan yang diatur tersebut dengan Pasal 59 ayat (1) dan bagaimana kedudukan penjelasan dalam satu undang-undang. Pun dalam Lampiran UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa adanya penjelasan adalah bentuk penfasiran resmi dari pembentuk atau pembuat undang-undang yaitu legislatif dalam hal ini DPR atas norma tertentu dalam batang tubuh. Sehingga penjelasan tidak lain menjabarkan atau menguraikan norma yang diatur dalam batang tubuh sehingga tujuannya adalah untuk memperjelas norma batang tubuh dan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatur sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan yang terpenting penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Sehingga MK berpendapat bahwa Penjelasan Pasal tersebut di atas secara terang telah mengandung norma baru yang justru bertentangan dengan norma yang ada.

e. Analisis

Inti dari demokrasi adalah kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan bermakna seorang warga negara berhak menentukan apa pilihannya, sedangkan kemerdekaan berarti ia mempunyai kewenangan penuh untuk berbuat tanpa tekanan dan intimidasi apapun. (Hery Susanto dkk, 2005:63). Pilkada secara langsung yang diinginkan oleh rakyat pada dasarnya ingin menguatkan dan memperbaiki kualitas demokrasi.

Prof. Dr. Ryaas Rasyid seorang ahli di bidang ilmu politik dan pemerintahan dalam sidang MK menyatakan bahwa penjelasan dalam Pasal yang dimohonkan tersebut justru tidak diperlukan karena yang diperlukan adalah penjelasan dalam ayat kedua terkait kategori partai dan gabungan partai yang akan mengajukan calon. Dr. H. Alfitra Salamm, APU juga menyatakan semangat UU PEMDA justru mendegradasi semangat demokrasi kita dan cenderung diskriminatif, karena seharusnya semua partai politik berhak mencalonkan, sehingga Penjelasan Pasal 59 ayat (1) itu, tidak demokratis, diskriminatif, dan bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik. Sehingga putusan MK ini telah memberikan perlindungan terhadap hak dipilih, mengapa demikian? Karena dengan adanya putusan ini maka semua partai politik memiliki kesempatan yang tidak boleh berbeda antara satu dan yang lain untuk dapat mengajukan calon tanpa dibeda bedakan dengan partai politik yang memiliki suara yang dibatasi. Hal ini tentu sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD NRI 1945 yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diakui, dijamin dan dilindungi haknya dihadapan hukum agar dapat mencapai kepastian dan keadilan. Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Pemda jelas mengklasifikasikan Partai Politik sehingga memunculkan ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan, karena dibedakan antara Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak memiliki kursi di DPRD. Padahal jika akumulasi suara sah sebesar (34,3 %) di Provinsi Sulawesi Utara justru diperoleh Partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga pengaturan ini jelas mengandung unsur diskriminatif. Sehingga menurut penulis putusan ini telah memberikan perlindungan terhadap hak dipilih. Hal ini juga senada dengan pendapat Suhrizal (2003:64-65) yang menyatakan dengan adanya putusan MK tersebut, berarti parpol atau gabungan parpol

yang boleh mengajukan calon kepala daerah tidak hanya mereka yang mempunyai kursi di DPRD. Namun bisa merupakan gabungan parpol yang akumulasi suaranya lebih dari 15% dalam pemilihan anggota DPRD 2004 lalu.

Penerapan parliamentary threshold dinilai beberapa pihak bisa memasung proses demokrasi yang baru berlangsung sejak reformasi 1998. Penerapan parliamentary threshold juga dinilai tidak mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Menurut pengamat politik dari *Institute Development for Local Parliament (IDELP)* Agustinus Tamo Mbapa, di Jakarta, Selasa (23/10), dikuatirkan penerapan parliamentary threshold pada Pemilihan Umum 2009, akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi. Partai politik yang merasa besar akan terjadi hegemoni dan terjadi kristalisasi fragmentasi kepentingan di parlemen oleh kelompok-kelompok yang sama baik di tingkat DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. (*Jurnal Konstitusi* Volume 8 Nomor 2, April 2011: 2).

Pilkada secara langsung yang diinginkan oleh rakyat pada dasarnya ingin menguatkan dan memperbaiki kualitas demokrasi. Secara normatif justru dapat memberikan harapan baru bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal yang dinilai berdasar tolok ukur demokrasi. Berikut ini merupakan manfaat dari pelaksanaan pilkada langsung: (*Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.26, No.1, Maret 2018-Agustus 2018:122)

- 1) pilkada langsung dalam suatu proses demokrasi dapat membuka ruang partisipasi yang luas khususnya bagi masyarakat secara umum
- 2) Dari sisi kompetisi politik, Pilkada langsung dapat menciptakan harapan baru terkait lebih luasnya calon calon yang akan

bersaing secara terbuka tidak seperti perwakilkan yang cenderung tertutup, tidak fair.

- 3) Sistem pemilihan langsung akan memberikan peluang terhadap seluruh masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih tepat dan maksimal tanpa tercederai karena dikurangi hak-hak nya oleh kepentingan-kepentingan elit politik;
- 4) Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan benar-benar merupakan keinginan dari rakyat, sehingga secara tidak langsung kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya akan meningkat yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat;
- 5) Kepala daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan pilkada secara langsung salah satunya adalah untuk mendapatkan sosok pemimpin kepala daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya, namun dengan penerapan parliamentary threshold di dalam pelaksanaan pilkada membuat tujuan tersebut akan sulit terlaksana bahkan hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi sejumlah partai politik.

Maka dengan adanya putusan MK tersebut, berarti parpol atau gabungan parpol yang boleh mengajukan calon kepala daerah tidak hanya mereka yang mempunyai kursi di DPRD. Namun bisa merupakan gabungan parpol yang akumulasi suaranya lebih dari 15% dalam pemilihan anggota DPRD 2004 lalu. Putusan MK ini

jelas-jelas memberikan perlakuan yang sama serta sederajat terhadap sesama partai politik, karena dibedakan antara partai politik yang memiliki kursi di DPRD dan yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sehingga putusan mk ini memberikan perlindungan terhadap hak dipilih bagi warga negara.

3. Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 (pasangan calon Kepala Daerah dapat diajukan oleh seluruh partai politik)

a. Identitas Pemohon

Lalu Ranggalawe yang dikuasakan kepada kepada: 1. Suriahadi,S.H.; 2. Edy Gunawan,S.H.,

b. Pokok Permohonan

Pokok Permohonan Pemohon adalah beberapa pasal UU Pemda, yang tidak memungkinkan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tanpa melalui parpol atau gabungan parpol. Ketiga pasal dalam UU Pemda tersebut adalah Ketentuan Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60, UU Pemda yang pada pokoknya berisikan“ hanya memberikan hak kepada parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan/mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepada daerah dan sama sekali menutup peluang bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana juga halnya dengan diri Pemohon sebagai salah warga negara yang berkeinginan sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada di daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, jelas-jelas bahwa ketiga pasal UU Pemda tersebut sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. Bahwa Pasal 56, Pasal 59 dan Pasal 60 UU Pemda tersebut telah mengesankan adanya arogansi partai politik yang tidak memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik di daerah secara demokratis dan tidak

memberikan alternatif adanya pasangan calon yang lebih variatif dari berbagai sumber khususnya bagi calon independen. Dalam era reformasi sekarang ini masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk memilih dan mengusung pemimpinnya yang terbaik secara independen agar aspirasi tersebut betul-betul berangkat dan bertitik tolak dari keinginan rakyat

c. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 Ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik” yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada. Sehingga pasal yang dikabulkan menjadi berbunyi :
 - Pasal 59 Ayat (1): ”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”;
 - Pasal 59 Ayat (2): ”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;
 - Pasal 59 Ayat (3): ”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah berlandaskan pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945, yaitu Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi, “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dimana pengaturan secara teknis perlu diatur lebih lanjut dalam UU. Mahkamah melalui putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyampaikan bahwa berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala daerah merupakan pilihan kebijakan dari lembaga legislatif yaitu sifatnya *open legal policy*. UU Pemda menderivasikan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Mahkamah berpendapat jaminan persamaan hak dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya ialah merekomendasikan bahwa substansi UU Pemda harus menyesuaikan dengan perkembangan dari pembentuk undang-undang, yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh. Karena jelas bahwa mencalonkan tanpa melalui parpol atau biasa disebut perorangan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Mahkamah berpendapat agar tidak terdapat dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dan menjamin terlindunginya hak yang diamanahkan oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 maka pencalonan kepala

daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka.

e. Analisis

Ahli Prof. Dr. Ibramsyah, M.S. dalam sidang pengujian undang-undang di MK menyampaikan bahwa dalam konteks calon perseorangan dalam pilkada pada dasarnya dapat dilihat dari tiga perspektif pemikiran:

1. Nilai-nilai dan proses demokrasi, Seymour Martin Lipzig, sosiolog besar Amerika Serikat mengemukakan bahwa hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi oleh apapun termasuk akses untuk memilih pemimpin. Lipzig dalam bukunya *Political Men* segala bentuk pembatasan terhadap akses demokrasi adalah penghinaan demokrasi
2. Dinamika sosial politik yang sedang terjadi di Indonesia, menghilangkan calon independen berarti menghilangkan sebelah keping dari nilai demokrasi karena di dalam masyarakat itu bukan hanya ada partai politik yang mewakili kepentingan politik, tetapi ada golongan di luar partai politik dan kalau ingin disebut nilai demokrasi dinilai dengan baik, maka calon independen harus masuk di dalam proses pemilihan yang diselenggarakan oleh rakyat. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie mantan Presiden yang mengatakan melalui media televisi jangan sampai hak rakyat untuk berdemokrasi dibatasi yang mempunyai makna bahwa jabatan politik pemerintahan melalui satu jalur saja yang akses lain tertutup. Dinamika politik yang sedang berjalan di tanah air ini, proses politik yang sehat dan baik adalah proses yang menangkap dinamika politik yang terjadi di masyarakat secara arif dan bijaksana. Karena dari hasil survei yang dilakukan oleh ahli, provinsi di Indonesia 40% lebih mendambakan adanya calon

independen. Jadi kalau proses politik ingin dikatakan sehat dan tidak distorsi demokrasi, calon independen harus diakomodasi.

3. Kesamaan hak demokrasi bagi seluruh warga negara. Jadi kalau di Aceh diberikan kesempatan ada calon independen, terlepas dari latar belakangnya maka masyarakat Jakarta dan masyarakat lain pun di Indonesia harus diberikan kesempatan yang sama dalam hak demokrasi.

Dari pendapat tersebut kita dapat melihat bahwa perbedaan antara partai politik dan perseorangan untuk dapat mengajukan dalam pemilu ternyata justru memberikan perlakuan yang diskriminatif di hadapan hukum, karena baik itu calon perseorangan maupun partai politik sama-sama memiliki kesempatan untuk mengajukan diri menjadi calon kepala daerah sehingga diperbolehkannya calon perseorangan itu sendiri merupakan wujud perlindungan dari hak untuk dipilih yang di konkretkan dalam putusan MK ini. Keberadaan calon perseorangan dalam Pemilukada secara langsung memberikan peluang bagi kemunculan pimpinan yang berasal dari politik arus bawah. Masyarakat tidak sekedar menjadi penonton atau pemilih calon-calon yang diusulkan oleh partai politik namun dapat bertindak sebagai aktor politik yang secara aktif mengusung calon dan memilihnya di Pemilukada atau bahkan menjadi calon kepala daerah.

Hadirnya seseorang secara personal memiliki makna filosofis sebagai kekuatan yang benar-benar otonom, kehadiran calon perseorangan benar-benar menjadi stake holder utama dari proses politik dalam pilkada. Dalam UUD NRI 1945 dengan tegas telah dinyatakan kedaulatan berada sepenuhnya ditangan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat, yang

kemudian dikenal dengan falsafah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (*Jurnal masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.40 No2. 2011:6). Dalam falsafah yang demikian inilah, maka hadirnya calon perseorangan sebenarnya mengandung makna, bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk membangun iklim dan sistem perpolitikan yang berorientasi pada kepentingan dan partisipasi rakyat dengan tetap meletakkan pertanggungjawaban kepada rakyat. karena pada dasarnya adanya calon perseorangan juga akan berdampak pada berkembangnya demokrasi di arus global sebagaimana yang disampaikan oleh Kelik Endro Suryono *“the new system of independent candidacy in these election open a democratic space that spawned local current healthy competitions as an effort to find a qualified leader figure, in order to meet the region amid global flows and it will expand the democratic space”*. (*Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.61 2017: 2)

Pergeseran paradigma kekuasaan dalam pilkada yang disebabkan adanya perluasan makna oleh MK mengakibatkan putusan yang demikian, dengan memaknai bahwa kepala daerah selain dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, juga dapat berasal dari perseorangan, maka pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hanya menjadi hak parpol akan tetapi juga membuka kesempatan kepada perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan argumen keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang calon perseorangan. Pergeseran paradigma ini menyebabkan berubahnya politik hukum dalam pengisian jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh pembentuk undang-undang, yang akhirnya membentuk regulasi tentang calon perseorangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2008. Berhubung dengan hal tersebut,

maka Mahkamah Konstitusi ternyata telah membaca teks undang-undang dasar secara "*moral reading*" sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Dworkin,(1996:4) membaca undang-undang dasar sebagai suatu "*moral reading*" merupakan suatu aktivitas intelektual yang istimewa. Di sini, naskah atau teks undang-undang dasar tidak boleh dibaca secara datar, melainkan dicari maknanya yang dalam dan tersembunyi di belakang naskah. Menurut Dworkin, membaca secara bermakna ini adalah mencari dan menemukan kandungan moral dari naskah.

Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah harus didasarkan pada prinsip demokrasi, sehingga harus mampu memberi akses yang luas bagi segala kekuatan dalam masyarakat selaku pemegang kendali kedaulatan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UUD 195 yang mengamanahkan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.” (*Buletin Hukum dan Keadilan “ADALAH”,* Volume 1 Nomor 2a,2017:2). Putusan Mahkamah Konstitusi menghilangkan kebimbangan masyarakat dan para calon yang sebelumnya tidak dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Putusan ini berimplikasi pada perluasan hak pilih secara universal sebagai akibat perluasan penafsiran Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang mengakibatkan pergeseran paradigma kekuasaan dalam pemilu, hingga calon perseorangan diperbolehkan dalam pemilu.(*Jurnal masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.40 No2. 2011:6).

4. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 (penentuan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak)

a. Identitas Pemohon

Pemohon Perkara Nomor 22/PUU-VI/2008 adalah Muhammad Sholeh sedangkan pemohon Perkara Nomor 24/PUU-VI/2008 ialah Sutjipto, dkk.

b. Pokok Permohonan

Pokok permohonan dalam Putusan MK 22/PUU-VI/2008 adalah bahwa Pasal 55 UU 10/2008 yang menyebutkan bahwa didalam daftar bakal calon maka nama calon disusun berdasarkan nomor urut. Di dalam daftar bakal calon tersebut setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Pasal tersebut memberikan perlakuan yang istimewa kepada calon perempuan yang jelas merugikan diri Pemohon. Karena posisi di antara 3 orang calon harus ada calon perempuan tentu memberikan kemudahan bagi pemilih untuk melihat nama perempuan tersebut. Kesulitan dan kerunyaman ditambah harus mengabdikan bertahun-tahun menjadi syarat mutlak untuk dapat mendapatkan nomor urut teratas dirasa pemohon tidak sebanding dengan muatan pengaturan dalam pasal tersebut. Pasal 214 huruf a, b, c, d, huruf e UU tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik dalam mengatur calon-calonnya agar terpilih dengan menempatkannya pada nomor urut padahal Caleg tersebut belum tentu dikehendaki oleh rakyat. Sehingga penentuan Caleg bukan lagi murni pilihan rakyat, tetapi *like and dislike* dari petinggi/pengurus partai politik. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan tersebut diatas, maka hak konstitusional Pemohon telah dilanggar. Karena upaya Pemohon menjadi sia-sia apabila hanya mendapatkan suara 29% dari BPP. Sebab jika mengacu pada pasal tersebut maka penentuan untuk dapat menjadi anggota legislatif akan dikembalikan pada nomor urut. Begitu juga, jika Pemohon

mendapatkan suara di atas 30% tetap saja jika di nomor urut lebih kecil yang suaranya 30% maka penentuannya dikembalikan pada nomor urut kecil yang mendapatkan suara 30% .Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU 10/2008 sama sekali tidak mencerminkan tujuan hukum dan mencederai hak hak pemohon.

c. Amar Putusan

Menyatakan Pasal 214 huruf a,b,c,d dan e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

MK berpendapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan sistem proporsional terbuka yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan calon legislatif yang dipilih.

MK menilai konsekuensinya adalah lebih mudah untuk menentukan siapa yang berhak dipilih, yaitu calon legislatif yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak oleh karena itu Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan hukum Putusan MK menegaskan bahwa dasar filosofi setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan adanya

kesempatan memilih untuk memilih calon, pilihan itu harus dihargai dalam bentuk penentuan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

e. Analisis

MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan menyatakan Pasal 214 UU 10 Tahun 2008 yang merupakan ius constitutum tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Titik tolak yang dilakukan MK adalah ketentuan Pasal 214 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil. (Moh. Mahfud MD, 2009:3).

Melalui putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2008 bertentangan dengan UUD 1945. Secara bersamaan MK menyatakan bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam konklusinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif adalah berdasarkan suara terbanyak. Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memberi sinyal bahwa kedaulatan rakyat mesti diwujudkan melalui sarana pemilihan umum yang menggunakan sistem penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Maka, adalah bertentangan dengan daulat rakyat jika caleg terpilih ditentukan dengan nomor urut, bukan dengan suara terbanyak. (Denny Indrayana, 2009:7). Disisi lain adanya putusan MK ini jelas memberrikan dan mencerminkan perlindungan hak dipilih bagi calon anggota legislatif, yang tidak di kebiri suaranya hanya dengan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dimana belum tentu suara rakyat menginginkan hal yang sama dengan partai politik tersebut.

Hendra Nurtjahyo (2006:75) berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat setidaknya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu : kebebasan, kesamaan, kedaulatan suara mayoritas (rakyat). Tidak ada artinya kebebasan bila tidak ada kesamaan. Kebebasan tanpa kesamaan akan melahirkan tirani baru. Sebaliknya, kesamaan tidak akan pernah ada bila kebebasan tidak diberikan. Kedua-duanya tidak akan terwujud bila tidak diakui kedaulatannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat setidaknya ada empat, yaitu : kebebasan, kesamaan/kesetaraan, suara mayoritas, dan pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat (disebut prinsip esensial) dan dua prinsip kedua merupakan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat (disebut prinsip prosedural).

Berkaitan dengan putusan MK ini menentukan dengan suara terbanyak adalah konkretisasi dari prinsip Suara Mayoritas.

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kesamaan/kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Di mana pun demokrasi berada, maka kebebasan dan kesamaan hak politik akhirnya dimanifestasikan ke dalam pilihan politik melalui prosedur suara rakyat yang diukur secara kualitatif (*majority principle*) dan aktualisasinya melalui voting. (Hendra Nurtjahyo, 2006:76-77). Mengukuhkan pendapat tersebut, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok (umum) yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh ditengah masyarakat. Ide yang melandasi prinsip suara mayoritas ini adalah tata sosial harus selaras dengan kehendak dari pada subjek sebanyakbanyaknya, dan tidak selaras dengan kehendak para subjek dalam jumlah sekecil-kecilnya. Dengan demikian, maka kehendak mayoritaslah yang seharusnya menjadi tatanan sosial sebuah negara. (Hans Kelsen, 2007:349). karena Dalam konsep kedaulatan rakyat, rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada pihakpihak yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara, baik itu legislatif maupun eksekutif. (*Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010: 132).

Secara konseptual, prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi dari adanya prinsip kebebasan dan kesamaan. Kalau UUD 1945 sudah menganut dua prinsip esensial demokrasi, maka secara linear, UUD 1945 juga menganut prinsip suara terbanyak sebagai cara mewujudkan dua prinsip itu. Banyak ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan rujukan untuk membenarkan bahwa UUD 1945 menerapkan prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Pasal 2 ayat (3), Pasal 6A ayat (3) dan (4), Pasal 7B ayat (3) dan ayat (7), Pasal 37 ayat (4) adalah beberapa

pasal yang dapat disebutkan sebagai penerapan prinsip suara terbanyak. Karenanya, pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa “melanggar” kesepakatan kultural dan juga aturanaturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.(Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.13 No.2 , 2014:12). Terkait mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara luas dan langsung, UUD1945 telah memuat ketentuan tentang pemilihan umum secara khusus. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan rumusan kedaulatan rakyat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya perubahan rumusan tentang kedaulatan, aliran mandat kedaulatan yang dimiliki rakyat dapat mengalir langsung secara periodik kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan kepala pemerintahan (presiden) melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum bebas, dan rahasia.(Jimly Asshidiqie, 2004:41)

Sehingga Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap hak dipilih dan memilih dalam konteks setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah sama tidak adilnya dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama, sepanjang tetap dilaksanakan melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum bebas, dan rahasia.

5. **Putusan MK Nomor 04/PUU-VII/2009 ,Putusan MK 42/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 (terkait mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah)**

a. Identitas Pemohon

- 1) Pemohon perkara Nomor 04/PUU-VII/2009 adalah Robertus
- 2) Pemohon perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 Fathor Rasyid dan Jumanto .
- 3) Pemohon perkara Nomor 51/PUU-XIV/2016 **adalah** Ir. H . Abdullah Puteh
- 4) Pemohon perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP

b. Pokok Permohonan

- 1) Pokok Permohonan perkara Nomor 04/PUU-VII/2009 adalah UU Pemilu Pasal 12 huruf g yang mengatur persyaratan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” serta UU Pemda Pasal 58 huruf f mengatur sebagai berikut: Pasal 58 Huruf f yang menyebutkan bahwa Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Bahwa beberapa pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.
- 2) Pokok permohonan perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 bahwa Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015, telah menghilangkan hak konstitusional yakni hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan konsekuensi dari diakuinya asas bahwa Negara Indonesia adalah “negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit ditegaskan lagi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 3) Pokok permohonan dalam perkara No. 51/PUU-XIV/2016. terhadap undang-undang khusus yaitu menguji Pasal 67 ayat (2) huruf g UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemohon berpendapat bahwa keringanan syarat bagi mantan terpidana yang terdapat dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 tidak dapat diberlakukan dalam Pemilihan Serentak di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2017, karena masih memberlakukan pasal a quo. Sehingga perbedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya.
- 4) Pokok permohonan dalam perkara No. 71/PUU-XIV/2016 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang. Pemohon berpendapat bahwa pasal a quo telah memperluas cakupan tindak pidana, yang semula dibatasi hanya terhadap perbuatan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, diubah menjadi seluruh tindak pidana, juga mencakup seluruh perbuatan tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat secara luas, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan hak

konstitusional seseorang untuk dipilih, termasuk pemohon, yang bermuara pada persaingan tidak sehat dan tidak fair.

c. Amar Putusan

- 1) Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009MK menyatakan bahwa ketentuan syarat tidak pernah dipidana adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).
- 2) perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1) Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - 2) Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Amar Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 ,MK memutus permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, beralasan menurut hukum.

- 4) Amar putusan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 Permohonan ini dikabulkan untuk sebagian oleh MK dengan menyatakan bahwa pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dengan dimaknai pasal a quo: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun/lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

- 1) Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
 - d) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 2) Dalam Permohonan perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 mahkamah berpendapat Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hakhak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak

bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

- 3) MK berpendapat dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 MK sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 42/PUUXIII/2015. Walaupun undangundang yang diuji berbeda dengan perkara a quo, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan No. 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini.

- 4) MK berpendapat dalam perkara Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 , Pertimbangan yang diberikan MK menyatakan bahwa UndangUndang a quo sama sekali tidak memuat ancaman pidana minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga dimaknai mencakup semua jenis tindak pidana, dan semua jenis pidana sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Namun tetap harus ada standar moral tertentu dibutuhkan dalam pengisian jabatanjabatan publik. Sehingga MK mendasarkan putusannya berdasarkan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, sedangkan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” tetap berlaku.

e. Analisis

Tindak Pidana Korupsi atau yang selanjutnya disebut dengan tipikor merupakan sebuah permasalahan nyata yang terjadi dan telah merusak sendi-sendi kehidupan negara. Tipikor seakan telah menjadi budaya yang tumbuh beriringan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata korupsi secara terminologi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.(Robert Klitgaard dkk, 2002: 3). Sedangkan dalam perspektif hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) telah mendefinisikan bahwa yang termasuk dalam tipikor adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Fenomena maraknya tipikor yang terjadi memang sangat memprihatinkan. Terlebih hampir 50% pelaku tipikor adalah para politisi yang telah diamanahi langsung oleh rakyat untuk memegang jabatan publik. Menurut Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016, selama 2004-2016, tercatat sebanyak 124 anggota DPR/DPRD, 17 gubernur, dan 58 walikota/bupati dan/atau wakilnya yang terjerat kasus korupsi. Jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan memperlihatkan betapa buruknya etika politik mereka. Sum Manit dalam *Legal Framework to Deter Corruption – a presentation in International Conference The Legal Framework to Deter Corruption* mengatakan bahwa dalam bidang politik korupsi endemik menyebar dan menyerang kualitas pemerintahan dan stabilitas nasional dengan cara mengikis legitimasi proses politik.(O.C. Kaligis, 2008:1). Hal ini akan berdampak mempersulit demokrasi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Selain itu, pada kenyataannya penanganan kasus korupsi cenderung melahirkan putusan pidana ringan. Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Aradila Caesar menerangkan bahwa vonis ringan paling banyak di tingkat Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan rata-rata hukuman satu tahun 11 bulan, kemudian pidana di tingkat banding 2,5 tahun penjara serta pidana di MA dengan empat tahun 11 bulan. Artinya langkah dan upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan hanya memberikan hukuman pidana ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif. Sehingga diperlukan adanya upaya penegakan hukum lebih agar menimbulkan efek jera

bagi pelaku Tipikor. Hal inilah yang kemudian mendasari munculnya pencabutan hak-hak politik terpidana tipikor.

Hak politik merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang diatur secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Hak politik ini mencakup hak pilih aktif dan pasif yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Namun di samping itu, hak politik adalah hak yang dapat dicabut karena dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin kepentingan umum. Pembatasan ini diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 70 UU HAM.

Syarat pencalonan mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih (elected officials) yang berbunyi, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” memiliki perkembangan yang cukup banyak (*Diponegoro Law Review* Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018:16), yaitu pertama, MK mengecualikan syarat tersebut terhadap tindak pidana kealpaan (*culpa levis*) dan kejahatan politik dalam Putusan MK No. 1417/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 15/PUU-VI/2008. Kemudian dalam Putusan MK No. 4/PUUVII/2009 dan Putusan MK No. 120/PUU-VII/2009, MK menentukan beberapa syarat yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Selanjutnya dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/ PUUXIV/2016, MK menyatakan syarat

tersebut dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan putusan MK yang terakhir terkait syarat tersebut yaitu Putusan MK No. 71/PUUXIV/2016 yang menentukan syarat tersebut dikecualikan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pencabutan dipilih memiliki pertimbangan hukum karena terpidana terbukti telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik (kepala daerah) atau penyelenggara negara. adanya pembatasan yang demikian justru sangat efektif lantaran “menimbulkan rasa malu” bagi terpidana korupsi. Hak politik sejatinya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang dirampas hak sosial-ekonominya oleh koruptor.

(Marwan Mas, <http://makassar.tribunnews.com/2014/12/03/mencabut-hak-politik-koruptor>, diakses tanggal 19 Februari 2019 Pukul 13.20). Pengaturan yang demikian lebih dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang kembali. Di dalamnya tersirat upaya untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Menurut penelitian ICW, dari 576 vonis kasus korupsi pada 2016, hanya ada tujuh vonis yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Vonis itu di antaranya dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishaaq, dan mantan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewi Yasin Limpo. Lebih memprihatinkan lagi, menurut penelitian ICW, rata-rata koruptor hanya divonis 2 tahun 2 bulan penjara selama 2016. Pada 2013, rata-rata vonis 2 tahun 11 bulan; pada 2014, 2 tahun 8 bulan; dan 2015, 2 tahun 2 bulan. Dengan rendahnya vonis itu, penjatuan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi. (Mimin Dwi Hartono, Staf Senior Komnas HAM Pencabutan Hak Politik Koruptor, berita Kompas Selasa, 14 Maret 2017, diakses pada 12 Maret 2019 Pukul 17.20.WIB)

Adanya vonis yang sering dijatuhkan cukup ringan dan jarang adanya penerapan pencabutan hak-hak tertentu oleh putusan pengadilan menyebabkan pembatasan kepada mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan kembali dalam pemilu merupakan pilihan yang tepat. Sehingga menurut penulis dalam hal ini harusnya MK RI lebih mempertimbangkan perkembangan dari demokrasi yang ada di Indonesia saat ini, mengingat dinamika pejabat legislatif maupun eksekutif yang banyak menyalahgunakan kewenangannya.

6. Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 (keluarga petahana diperbolehkan mencalonkan diri dalam pilkada)

1. Identitas Pemohon

Adnan Purichta Ichsan, S.H. sebagai pemohon

2. Pokok Permohonan

Ketentuan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya serta Pasal 7 huruf s UU 8/2015 yang menyatakan Pasal 7 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon kepala daerah adalah yang memenuhi persyaratan salah satunya tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Penjelasan Pasal 7 huruf r UU

tersebut yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Artinya rumusan pasal tersebut ditujukan bagi siapa saja yang memiliki hubungan darah atau masih keluarga tidak boleh mencalonkan diri sejak awal, tanpa mempertimpangkan seperti apa kemampuan dari calon tersebut dan apakah calon tersebut memenuhi unsur dapat diterima oleh seluruh masyarakat secara.

Bahwa dengan adanya pasal beserta penjelasannya diatas justru menunjukkan betapa bias, tidak jelas dan multi tafsir ketentuan yang telah dibuat. Hal itu dapat terjadi karena adanya perlakuan yang sifatnya diskriminatif un fair dan memberikan pembedaan dihadapan hukum. Padahal pembentuk UU dalam membuat suatu produk peraturan perundang- undangan harus memberikan materi yang sesuai dengan hierarki dan tentunya rumusan yang jelas sesuai dengan pedoman dalam UU 12/2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya pembedaan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum terhadap bakal calon kepala daerah yang “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” tentunya akan berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan demokratisasi serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk konkret dari dijabarkannya prinsip-prinsip dari negara hukum itu sendiri.

3. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

- a) Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- b) Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

4. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat permasalahan yang sesungguhnya dalam konteks pencalonan kepala daerah adalah tidak maksimal dan optimalnya mekanisme pengawasan terhadap eksekutif di daerah khususnya para petahana, sehingga memunculkan asumsi bahwa keluarga petahanapun dengan diperbolehkan mencalonkan diri akan mengganggu hak dan kebebasan orang lain yang juga akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Bagaimanapun apabila seorang yang memiliki hubungan keluarga atau darah dengan kepala daerah yang notabene adalah petahana tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai moral, keamanan ketertiban umum

serta agama, apalagi dengan alasan bahwa larangan tersebut hanya diberlakukan sementara selama belum terlampauinya satu periode jabatan tidak berpengaruh pada ketentuan tersebut yang jelas melanggar Pasal 28J Ayat(2) UUD NRI 1945.

Ketentuan dalam UU tersebut juga secara nyata terdapat unsur diskriminasi yang melakukan perlakuan yang berbeda terhadap bakal calon Kepala daerah yang hanya didasarkan atas alasan hubungan kekeluargaan atau darah semata. Padahal jelas konstitusi kita dalam Pasal 28I ayat (2) mengamanahkan agar setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama dan berhak atas perlindungan apabila hal tersebut terjadi. Dalam konteks kali ini tampak secara jelas bagaimana pembedaan yang dilakukan hanya ditujukan agar kelompok orang tertentu yaitu dalam hal ini adalah keluarga petahana untuk tidak dapat menggunakan haknya untuk dipilih dalam pencalonan kepala daerah yang jelas dijamin dalam Pasal 28J Ayat(2) UUD NRI 1945.

Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Diskriminasi yang dimaksud adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Demikian halnya dalam ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR yang salah satu di antaranya adalah ketentuan tentang larangan terhadap praktik diskriminasi.

Pasal 26 ICCPR tegas menyatakan, *“All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”* Dalam Pasal 26 ICCPR tersebut, kelahiran (birth) bahkan disebut secara khusus. Oleh karena itu, meskipun pemenuhan kewajiban internasional ini tidak serta-merta dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang, paling tidak ia menegaskan universalitas larangan terhadap praktik diskriminasi dimaksud. Bahwa oleh karena pembatasan yang termuat dalam rumusan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sekaligus mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

5. Analisis

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan norma mengenai hak dan kebebasan setiap individu dibatasi dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain agar tercipta keadilan, dengan mempertimbangkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum demi berjalannya demokrasi di negara ini. Ini sesuai dengan konsep fairness dalam Theory of Justice yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu orang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya harus memperoleh posisi yang sama pada saat memulai kompetisi, sehingga diperlukan keadilan dalam hukum yang berpihak pada yang lemah. Putusan MK No. 33/PUUXIII/2015 yang menghapus

ketentuan tentang konflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konsep fairness karena akan memberikan peluang ketidakseimbangan dalam persaingan dalam pilkada. Ini dapat berdampak pada publik dengan lahirnya politik kekerabatan dan demokrasi oligarki, sehingga mengakibatkan semakin banyak kepemimpinan di daerah yang berkuasa atas dasar politik dinasti. Oleh karena itu, diperlukan affirmative action sebagai pembatasan terhadap klan petahana untuk mencegah oligarki kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dalam kepemimpinan di daerah. Hal tersebut pada dasarnya telah dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada.

Berdasarkan landasan filosofis, putusan MK dapat dikatakan bersifat simplistik sebab hanya bersandar pada aspek diskriminatif dan pelanggaran hak asasi, sedangkan upaya untuk melakukan affirmative action sebagai keberpihakan terhadap pihak yang lemah dalam pilkada, yaitu calon yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana tidak menjadi acuan bagi MK dalam mengeluarkan Putusan MK No. 33/PUUXIII/2015.(Jurnal Info Singkat Hukum, Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015:7). Selain itu, Pasal 7 huruf r UU Pilkada juga tidak menyebutkan dasar yang digunakan untuk perlakuan diskriminasi. Ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Frasa “dasar apapun” pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 berarti bahwa setiap hal yang dapat menyebabkan diskriminasi harus dilarang sebagai konsekuensi logis dari Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Frasa “dasar apapun” ini tidak berarti perbedaan perlakuan selalu bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI 1945.

Pembatasan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pilkada sebagai penjabaran dari pengaturan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, agar kontestasi politik berjalan secara equal untuk memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan penyalahgunaan wewenang. Ini berarti bahwa inkonstitusionalitas Pasal 7 huruf r UU Pilkada terjadi karena ketidakpastian hukum akibat kekeliruan dalam pemaknaan norma bukan karena norma larangan yang bersifat diskriminatif, sehingga melahirkan putusan MK yang bersifat conditionally constitution. Secara sosiologis, baik mayoritas rakyat maupun keterangan ahli, pemerintah, dan DPR dalam putusan MK mendukung eksistensi Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut penjelasannya.

Negeri ini yang masih berusia muda dalam mengayuh jalan demokratisasi sangat perlu regenerasi kepemimpinan politik alternatif, kompeten, berintegritas, dan teruji kapasitasnya melalui intensitas yang panjang keterlibatannya dengan denyut nadi dan dinamika kehidupan sosial-politik di level lokal dan nasional. Pemimpin politik alternatif model ini hanya didapat melalui kompetisi sehat, adil, dan demokratis dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada putra-putri terbaik bangsa. Sebaliknya, dengan politik kekerabatan akan berpotensi melahirkan politik diskriminatif karena para kerabat petahana telah memiliki keistimewaan politis sebelum bertanding dalam pilkada, selain ditopang kekuasaan sang petahana kepala daerah, mereka juga memetik keuntungan popularitas petahana sebagai modal sosial yang paling kuat untuk menang dalam pilkada. (Agus Riewanto, Mahkamah Konstitusi Tak Progresif, Harian Kompas, 20 Juli 2015, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 21.30 WIB).. Dalam hal ikhwal strategi politik, petahana mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi dikarenakan setelah memimpin pada

periode sebelumnya dianggap lebih kenal dan dikenal oleh rakyatnya karena bersinggungan langsung terkait dengan kebijakan yang dikeluarkannya.

Studi tentang demokrasi dan kekuasaan politik oleh Gordon dan Landa (Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 1 No. 1 April 2016: 190) menemukan bahwa incumbent ingin melawan karena ketersediaan sumber daya, seperti memegang atau disebut diskon kampanye dana kampanye yang tidak tersedia bagi lawan. Dukungan dari incumbent ini berguna untuk membangun hubungan untuk mempengaruhi kelompok kepentingan atau elit dalam kabupaten / kota. Sebagai pemegang kekuasaan politik, incumbent memiliki banyak keuntungan untuk maju ke Pilkada berikutnya. Ini mengurangi dampak dari nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan dianggap tidak adil bagi penantang. Selain itu, partai politik seharusnya dapat memenangkan kekuasaan melalui pemilu.

Putusan MK ini bisa dimaknai bahwa MK telah melegalkan keluarga petahana dalam pilkada sehingga memperkuat praktik politik dinasti. Pakar hukum dan tata negara, Irmanputra Sidin menilai bahwa dengan dilegalkannya keluarga petahana untuk ikut dalam pilkada oleh MK, telah menjadi koreksi konstitusional terhadap UU Pilkada sehingga tidak ada alasan lagi bagi penyelenggara pilkada untuk menolak bagi keluarga petahana untuk dapat menjadi calon kepala daerah. Ini berarti bahwa Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dalam menafsirkan Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut penjelasannya tidak bersifat progresif, karena pembatasan ini bukan terletak pada calon incumbent melainkan pada kerabat petahana, sehingga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak secara resiprokal.

Namun, putusan MK ini dapat menghambat upaya memajukan demokrasi dan pembangunan budaya antikorupsi. Oleh

karena itu program legislasi nasional (Prolegnas) harus mempunyai kebijakan hukum perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan hubungan saling terintegrasi antarundang-undang dalam suatu sistem yang komprehensif. (J. Kristiadi, “Dinasti Politik, Sebab atau Akibat?,” Kompas, 21 Juli 2015).. Di beberapa negara yang telah memiliki sistem demokrasi yang mapan, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura, politik dinasti tidak dipermasalahkan, karena proses politik berlangsung dengan transparan dan akuntabel, untuk mendapatkan figur pemimpin yang kompeten berdasarkan kejujuran dan keteladanan. Selain itu, penggantian jabatan publik ke keluarga petahana berlangsung dengan jeda waktu berselang dari masa jabatan incumbent dan melalui proses yang transparan.

Demokrasi yang substantial adalah tidak terbatas pada bagaimana demokrasi itu berjalan baik (adanya partai politik, pemilu dan kebebasan pers), tapi melainkan demokrasi untuk menciptakan satu tatan politik yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena substansi demokrasi demikian maka relasinya adalah calon incumbent tentunya menyadari demokrasi sebagai alat dan nilai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. incumbent tidak boleh lagi memanfaatkan segala keunggulan untuk mempertahankan kekuasaan. Incumbent tidaklah boleh menggunakan keutungan tersebut untuk “menipu” publik. Demokrasi harus dijalankan secara substantial. Menghalalkan segala cara seperti banyak dilakukan incumbent tidak boleh lagi dipraktikkan karena sesungguhnya itu adalah mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sakli lagi incumbent harus di dudukan sama dengan kontestan non-incumben. Agar demokrasi berjalan satu arah dengan kesejahteraan rakyat.

MK berpendapat bahwa larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945

karena melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari tindakan diskriminatif. Ini didasarkan pada UUD NRI 1945 yang menjamin hak konstitusional bagi seluruh warga negara atas hak untuk dipilih. Atas dasar pertimbangan itu, maka materi muatan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan karena itu batal demi hukum.

Ratio decidendi putusan MK sangat sumir apabila dipahami berdasarkan interpretasi validitas norma hukum serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis suatu undang-undang. Pasal 7 huruf r UU Pilkada berikut penjelasannya mempunyai landasan filosofis yang berupa instrumen normatif yang lahir karena respons publik atas ketidakadilan dalam praktik pencalonan kerabat petahana dalam pilkada merupakan wujud demokrasi oligarki. Ini berarti bahwa Putusan MK hanya didasarkan pada aspek diskriminatif sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Diskriminatif tidak selamanya berarti perbedaan perlakuan terhadap warga negara bertendensi negatif, tetapi perbedaan perlakuan itu dapat merupakan diskriminasi positif (affirmative action) yang memberikan titik permulaan bagi kelompok marginal untuk ikut berkompetisi. (Bahrul Ilmi Yakup, Sengkarut Penalaran MK, Kompas, 23 Juli 2015, diakses pada 20 April 2019 Pukul 22.41 WIB) . Meskipun Fajar Laksono mengemukakan bahwa *“Voters should be aware that nonconventional corruption is a behavior that must be avoided. It is necessary to make people understand in order not to vote for a candidate who likes committing nonconventional corruption, as someday he might act corruptly in the conventional sense. Therefore, the space should be open wide for the people to demand the incumbent, as well as other candidates, to show commitment, consistency attitude, and*

integrity in the fight against political corruption”. (*Asia Pasific Fraud Journal* Volume 1, No.2 nd Edition 2016: 225). Kondisi yang demikian belum dapat diterapkan di Indonesia mengingat pendidikan politik sebagai fungsi partai politik sendiri tidak bisa berjalan secara baik dan maksimal, sehingga perlu ada upaya yang progresif agar dapat meminimalisir langgengnya dinasti politik yang potensial terjadi dengan diperbolehnkannya keluarga petahana untuk mencalonkan diri. Sehingga sesungguhnya putusan mk ini cenderung hanya melihat dari satu sisi diskriminasi saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat di Indonesia, apakah diskriminasi dilakukan secara positif atau justru negatif.

7. Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 (Larangan pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD)

a. Identitas Pemohon

Muhammad Hafidz sebagai Pemohon

b. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) yaitu pada frasa “pekerjaan lain” .yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang

berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”, karena: DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara.

Hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai tetapi menjadi pengurus partai politik. Oleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi pengurus partai politik sebagai persyaratan Calon Perseorangan DPD setelah UU Nomor 12/2003 diubah dan diganti dengan UU Pemilu sesudahnya, menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas undang-undang dan aturan. Keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi lokal. Sehingga hal hal yang dimohonkan oleh pemohon diatas dirasa belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inskonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

c. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

d. Pendapat Mahkamah Konstitusi

Mahkamah berpendapat dalam memahami makna arti kata pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD dalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu tersebut harus dipahami dan dikorelasikan dengan sejarah pembentukan dari keberadaan DPD itu sendiri. Menurut Mahkamah latar belakang historis lahirnya DPD adalah dengan berlandaskan pada maksud asli (*original intent*) perumus UUD NRI 1945 dan tetap mempertimbangkan perkembangan masyarakat yang ada saat ini, sehingga pendekatan sejarah ini karena dekan demikian akan terbentuk secara historis alasan keberadaan DPD sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI 1945.

MK berpendapat bahwa adanya perubahan yang mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya kekuasaan tertinggi berada di MPR menjadi supremasi konstitusi adalah hal yang berkesinambungan dengan alasan lahirnya atau dibentuknya DPD itu sendiri. MK menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPRD. Sehingga Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dikatakan koheren sebab jika DPD tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan undang-undang yang berkait dengan soal-soal tersebut maka hakikat representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politik). Apalagi, Anggota DPR yang berasal dari daerah provinsi tidaklah selalu sepenuhnya dapat dikatakan mewakili provinsi yang bersangkutan sebagaimana halnya anggota DPD karena basis pencalonan Anggota DPR adalah berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) di suatu provinsi meskipun untuk provinsi tertentu, provinsi sekaligus menjadi Dapil karena jumlah Dapil-nya berjumlah tidak lebih dari satu. Dengan demikian, dalam analisis selanjutnya, apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, in casu pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945.

Dengan tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh

menjadi calon anggota DPD, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD NRI 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf 1. Oleh karena itu Mahkamah penting menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu.

e. Analisis

Setiap orang yang memiliki hak memberikan suara diperbolehkan untuk menjalankan hak itu tanpa diskriminasi, berdasarkan perlakuan yang sama di depan hukum. Ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau pendapat, perkumpulan dengan minoritas nasional, kekayaan, kelahiran atau status lainnya yang berbeda tentu mencerminkan diskriminasi maka hal tersebut tidak diperkenankan dan tidak dapat mencabut hak warga negara yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan suara atau bersaing dalam pemilu (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002*).

Putusan MK ini pada dasarnya memang menimbulkan tidak dilindunginya hak dipilih bagi para Pengurus partai politik.

Sehingga selanjutnya harus dianalisis apakah pembatasan pembatasan yang dilakukan berdasarkan Putusan MK yang melarang pengurus partai politik ini adalah tepat berdasarkan pertimbangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu MK juga berpendapat bahwa Lazimnya dalam pemilu persoalan pembatasan hak pilih hanya boleh didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan yang pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Dalam konteks larangan pengurus partai politik dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPD maka juga diperlukan analisis mendalam. Jika dilihat keberadaan DPD sejak Amandemen ke-3 UUD NRI 1945 dilakukan untuk mengakomodir kepentingan daerah. DPD yang penyebarannya lebih luas dari DPR sebab mewakili setiap daerah yang berjumlah 4 orang untuk masing-masing daerah. Namun keberadaan yang banyak dari DPD tidak dimbangi dengan kewenangan yang diberikan kepada DPD. Menurut Ichsan Laulembah DPD seperti pohon Bonsai tumbuh tapi dikerdilkan, tumbuh tapi dipotkan. Kurang lebih itulah keberadaan DPD yang terbentuk dipilih oleh masing-masing daerah untuk mewakili kepentingan daerah namun setelah di pusat tidak memiliki kewenangan apa-apa.(Ichsan Laulembah, 2017, “Politik Jadi Anggota DPD”, URL : <https://www.Youtube.com/watch?v=BSm-RaP5Gyo>, diakses)

Menurut Refly Harun pakar Hukum Tata Negara Anggota DPD yang menjadi anggota partai politik menjalankan politik putus asa, karena DPD yang selama ini dianggap tidak diperhatikan, sehingga melakukan berbagai cara untuk

memperkuat DPD salah satunya adalah dengan masuk menjadi anggota partai politik, padahal dalam hakikat kelembagaan politik setiap DPD tidak seharusnya bias kelompok ataupun bias partai politik. (Refly Harun, 2017, “Politis Jadi Anggota DPD”, URL : [https : / / www. Youtube.com / watch ? v= BSm-RaP5Gyo](https://www.Youtube.com/watch?v=BSm-RaP5Gyo), diakses).

Adanya dua kamar perwakilan atau bikameralisme sebenarnya lahir untuk mendorong adanya *checks and balances* di dalam lembaga perwakilan. Perlu digarisbawahi, kata kunci dalam konteks parlemen bikameral (dan dalam politik secara umum) adalah ‘kompetisi’. Perlu ada ‘kompetisi’ antara dewan tinggi dan dewan rendah untuk memunculkan kondisi saling mengontrol yang menimbulkan keseimbangan politik (*checks and balances*) di dalam parlemen itu sendiri. Dan memang, kebutuhan akan adanya dua dewan dalam satu lembaga perwakilan adalah untuk mewakili konstituensi yang berbeda sehingga terjadi proses deliberasi yang lebih baik. Karena itu pula, biasanya wewenangnya dibuat sedemikian rupa sehingga ada kelebihan dan kekurangan yang didisain berbeda di antara keduanya. Dengan begitu, dapat terjadi proses yang membatasi kewenangan yang berlebihan dari suatu lembaga politik.

Untuk memberikan gambaran mengenai “kompetisi politik” antara dua kamar ini, penelitian yang dilakukan oleh Arend Lijphart terhadap 36 negara yang menganut bikameral dapat dijadikan referensi. Lijphart menyimpulkan adanya dua karakter untuk melihat keberadaan sistem bikameral yang diterapkan kuat (*strong bicameralism*) atau lemah (*weak bicameralism*) (Lijphart, 1999: 203-205). Pertama, kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh kedua kamar. Kecenderungannya, kamar kedua (Senate di Amerika Serikat, Bundesrat di Jerman, atau DPD di Indonesia) biasanya mempunyai kewenangan yang lebih kecil daripada kamar

pertama (*House of Representatives* di Amerika Serikat, Bundestag di Jerman, atau DPR di Indonesia). Kedua, signifikansi politik kamar kedua tergantung tidak hanya dari kekuatan formal mereka, melainkan juga dari cara pemilihan anggotanya. Kedua karakter ini saling berkaitan. Kamar kedua yang anggotanya tidak dipilih secara langsung mempunyai legitimasi yang minimal dan karenanya biasanya mempunyai peran politik yang kurang penting. Oleh sebab itu, ada tendensi kamar kedua, yang anggotanya punya legitimasi kuat karena dipilih secara langsung, diberikan wewenang yang lebih kecil daripada kamar pertama. Dari kedua karakter ini, Lijphart kemudian mengklasifikasi parlemen bikameral menjadi dua kelompok, yaitu simetris dan asimetris. Bikameral dikatakan simetris bila kekuatan di antara kamar pertama dan kedua relatif setara dan disebut asimetris bila kekuatan di antara keduanya sangat tidak berimbang. Di titik ini, yang penting untuk digarisbawahi adalah tesis Lijphart yang kedua, mengenai pentingnya cara pemilihan anggotanya untuk menentukan seberapa besar lembaga legislatif berkamar dua ini bisa menimbulkan situasi checks and balances.

Bivitri Susanti dalam Sidang MK menyatakan bahwa Pertama, adanya pengurus partai politik telah mendorong adanya perubahan karakter keterwakilan DPD. DPD kini telah dilihat sebagai wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut Pimpinan DPD, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekadar perebutan fasilitas keuangan dan protokoler. Pimpinan DPD juga akan mempunyai pengaruh pada konstelasi Pimpinan MPR dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah vs. “oposisi.” DPD menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. Keduanya memang tidak mudah untuk dipilah dan didefinisikan. Namun yang

ingin saya soroti adalah agenda politik partai di tingkat nasional, seperti perubahan UUD dan legislasi yang berkaitan dengan politik; dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi terkait pemerintahan daerah dan soal memperjuangkan kepentingan konstituensi berbasis provinsi di dalam legislasi.

Dengan demikian, dapat dikaji dua poin utama yang menjadi alasan mengapa anggota DPD harus bebas dari anggota partai politik. Yang pertama, secara konstitusional, melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang mengatur keanggotaan dalam lembaga DPR dan DPD, ketentuan menyangkut pemilihan anggota tersebut, diatur dalam Pasal 22E ayat (3) “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik” dan ayat (4) “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”. Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdapat perbedaan pola rekrutmen antara DPR dan DPD. Perbedaan antara keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakili masing-masing. DPR sebagai perwakilan politik (*political representation*) dimaksudkan untuk mewakili rakyat dalam kepentingan nasional, sedangkan DPD sebagai perwakilan teritorial/ daerah (*territorial representation*) dimaksudkan untuk mewakili kepentingan daerah. Perbedaan hakikat perwakilan ini penting untuk mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya “*double representation*” atau keterwakilan ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus parpol, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR di mana parpol yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Kedua, berdasarkan original intent pembentukan DPD, untuk

pengisian anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik. Pasal 22E ayat 4 UUD NRI 1945 secara implisit mengamanatkan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”. Hakikat peserta pemilihan DPD yang bersifat perseorangan mencakup pula non partai politik (bukan anggota atau pengurus partai politik). Peristiwa anggota DPD yang terafiliasi dengan partai politik dan tidak adanya ketentuan secara jelas mengenai larangan non partai politik saat pencalonan DPD bukan hanya bertentangan dengan amanat konstitusi, tetapi juga semakin mengaburkan esensi DPD sebagai wakil daerah secara perseorangan. Adapun putusan MK mengenai larangan anggota DPD berasal dari partai politik ini telah berdasarkan koridor hukum dan konstitusi serta tidak bermuatan politis sebagaimana yang kerap kali diutarakan oleh beberapa pihak. Putusan MK ini jelas tidak mereduksi hak politik seseorang karena menurut Pasal 266 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa seseorang menjadi calon anggota DPD berstatus definitif apabila sudah melalui serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi kelengkapan administrasi, penetapan daftar calon sementara, hingga bermuara pada penetapan dan pengumuman daftar calon tetap. Melalui hadirnya putusan ini, maka KPU yang tinggal menindaklanjutinya dengan memastikan bahwa calon anggota DPD yang sudah mendaftar tersebut memberikan dokumen tambahan berupa surat keterangan pengunduran diri dari kepengurusan partai politik Artinya para pengurus parpol yang berniat maju sebagai anggota DPD tetap bisa maju dalam pemilu 2019 dengan memilih keluar dari kepengurusan parpol. Atau sebaliknya, memilih menjadi pengurus parpol dengan tidak maju sebagai anggota DPD.

Putusan MK yang melarang pengurus partai politik ini adalah tepat berdasarkan pertimbangan dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Sebab dengan adanya putusan MK ini maka secara tidak langsung terjadi purifikasi keanggotaan DPD yang hakikatnya adalah representasi daerah yang melekat dalam eksistensi DPD (yang anggota-anggotanya bukan berasal dari partai politik) akan terdegradasi karena keputusan politik yang diambil dalam soal-soal yang langsung berkait dengan kepentingan daerah tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh lembaga yang merupakan representasi politik, yakni DPR (yang anggotanya berasal dari partai politik).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya keberadaan hak memilih dan dipilih sebagai bentuk konkret demokrasi prosedural yang dijamin oleh UUD NRI 1945 , maka pelaksanaannya harus mendapat perlindungan terutama oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan penjaga dan pengawal konstitusi serta nilai-nilai demokrasi. Adanya produk peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum yang memiliki potensi terlanggarnya hak pilih dapat berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena adanya hak pilih sangat menjadi senjata yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak pilih juga merupakan gerbang bagi setiap orang untuk duduk dalam pemerintahan melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes menjadi salah satu bentuk check and balances bagi berjalannya suatu pemerintahan, serta berimplikasi pada sifat kehati-hatian bagi legislatif.
2. Selama kurun waktu tahun 2003-2018 atau 14 tahun MK RI telah mengeluarkan putusan yang dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian dan terkait dengan hak memilih dan dipilih adalah sejumlah 13 Putusan. Putusan MK terkait hak memilih sejumlah 3 (tiga) putusan telah memberikan perlindungan terhadap hak memilih karena menghilangkan bentuk diskriminasi dan menjamin hak yang diamanahkan UUD NRI 1945. Putusan MK terkait hak dipilih sejumlah 10 (sepuluh) putusan, dua diantaranya perlu kiranya untuk dicermati dan ditelaah lagi yaitu berkaitan dengan diperbolehkannya keluarga petahana untuk mencalonkan diri dan diperbolehkannya antan narapidana untuk mencalonkan di lembaga legislatif karena menurut penulis dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

B. Saran

1. MK RI perlu terus menjaga konsistensi putusan-putusannya agar tetap memberikan perlindungan terhadap hak memilih. Dan terkait hak dipilih MK RI harus juga mempertimbangkan dari perspektif perkembangan demokrasi agar, Putusan MK disisi lain juga dapat mengawal berkembangnya demokrasi di Indonesia.
2. Lembaga legislatif harus responsif terhadap putusan-putusan MK yang telah membatalkan atau menafsirkan suatu norma, sehingga putusan mk ini dapat memiliki kekuatan eksekutorial yang berdampak secara langsung bagi kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*. 2000. Bandung: Yapemdo

A. Himmawan Utomo. 2007. "*Konstitusi*", *Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius

A. Ubaidillah, dkk.. 2007. *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung,:Alumni.

Bagir Manan. 2008. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta : UII Press

Bambang Sutiyo. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta :UII Press,

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Bintan Regen Saragih. 2006. *Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*. Bandung: Utama

Brian Thompson. 1997. "*Textbook on constitutional and administrative law*". London : Blackstone Press. Ltd.

C.F. Strong. 1972. *Modern Political Constitutions, Sidgwick and Jackson 8th Revised*. London

Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan.

Duga Das Basu. 2003. *Human Rights in Constitutional Law*. New Delhi-NagpurAgra: Wadhwa and Company

Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet

G.S. Diponolo. 1975. *Ilmu Negara*. Balai Pustaka: Jakarta

- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta : Bee Media Indonesia
- I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) .2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*
- Ismail Saleh. 1988. *Demokrasi, Konstitusi, dan Hukum*. Jakarta: Depkeh RI
- Jeremy Waldron. 1999. *The Dignity of Legislation*. Cambridge University Press.
- Jhon Pieris. 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. edisi 1*. Jakarta: Pelangi Cendikia
- Jimly Asshidiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Cet.I*. Jakarta: Konstitusi Press
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar fi lsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K.C. Wheare. 1975. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Masyhur Effendy. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia; Dari UUD 1945 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana
- 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT Rajawali Pers

- Maruarar Siahaan.2011.*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, edisi 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Mahfud MD.1998.*Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- 2009. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- 2010.*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta :Raja Grafindo Persada
- 2011.*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.Jakarta: Rajawali Press
- Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*,Jakarta: Gramedia Pustaka
- MPR RI. 2001. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- MPR RI.2007. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Ni'matul Huda.2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurainun Simangunsong.2008.*Judicial Review di Indonesia; Teori, Perbandingan dan Pelaksanannya Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan I. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- O.C. Kaligis, 2008, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 1*, Bandung: P.T. Alumni,
- Parlin M. Mangunsong.1922. *Konvensi Ketatanegaraan sebagai Salah Satu Sarana Peranan Perubahan UUD*. Bandung: Penerbit Alumni
- Peter Mahmud Marzuki.2014.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Group,
- Robert Klitgaard dkk, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, terj Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sri Soemantri.1977.*Hak Uji Materil di Indonesia*.Bandung:PT. Alumni

- Sri Soemantri.1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto.2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Rajawali Pers
- William G. Andrews.1968. *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition.
- 2010.*Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi : The Biography Institute
- 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.Jakarta:SinarGrafika

JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH ,TESIS

- Achmad dan Mulyanto.2013. “Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari–April 2013*:Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Agus Budi Santoso.2015. “Eksistensi Dan Problematisa Calon Independen Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.” *Jurnal refleksi hukum* Vol.1 No.2. 2015,
- Andre Ristiyan.2016. “Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 1 No. 1 April 2016*.
- Anonym.2002. “Jurnal analisis sosial.. 2002.Volume 7
- Bambang Sutyoso. 2010. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”. *Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:Jakarta.
- Bisariyadi. “Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat”. *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*
- Dessi Permatasari* dan Cahyo Seftyono .2014. “Musyawarah Mufakat Atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*,Vol.13 No.2 , 2014,
- Fajar Laksono. 2016. “*Political Corruption Prevention In Regional Election After The Decision Of The Constitutional Court No. 33/Puu-Xii/2014*. *Asia Pasific Fraud Journal*. Volume 1, No.2 nd Edition 2016

- Hartuti Purnaweni. 2004. "Demokrasi Indonesia : Dari Masa ke Masa". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 2
- Indra Perwira, dkk.. November 2010. "Budaya Konstitusi (Constitutional Culture) Dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan Dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945". *Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Janpatar Simamora. 2013. "The Protection Of Citizen's Constitutional Right To Vote". *Jurnal Komisi Yudisial* Vol.6 No.2
- Jenedjri M. Gaffar. 2001, " Kedudukan Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*
- Kartono.2011. "Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
- Kelik endro suryono. 2017. "[Legal Review of Individual Candidate in Direct Elections](#)". *Journal of Law, Policy and Globalization* Vol.61.
- Khairul Fahmi.2010. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif". *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- Marcus Mietzner. 2017. "Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court", *Journal of East Asian Studies*. Volume 10 Issue 3
- Mariyadi Faqih. Juni 2010. "Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Mohammad Alexander M. 2015. "Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar". Surabaya: Universitas Airlangga.
- M.Laica Marzuk. 2010. "Konstitusi dan konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7 Nomor 4 .Agustus 2010.
- Nuruddin Hady. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo r: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti

- Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang”. *Jurnal Arena Hukum Volume 11*, Nomor 3, Desember 2018.
- Pan Mohamad Faiz.2016. “*The Protection of Civil and Political Rights by the Constitutional Court of Indonesia*”. *Indonesia Law Review*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2016.
- Puguh Windrawan.2013. “Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia”. *Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 1, Juni 2013*.
- Retno Saraswati. 2011.“Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan Dalam Pemilukada”.*Jurnal masalah-masalah Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.40 No2. 2011,
- Robert Alexy.2014. “*Constitutional Rights and Proportionality*”. *Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*
- Sarbaini, Sh. Mh.2015. “Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum” . *Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015*
- Shanti Dwi Kartika. 2015. “Putusan Mk Melegalkan Politik Dinasti Dalam Uu Pilkada” *Jurnal Info Singkat Hukum*,Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015.
- Sunny Ummul Firdaus. 2011. “*Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis*”, Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 2, April 2011
- Syahrudin. 2010. “Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri ”. *Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*: Makassar.
- Susi Dwi Haridjanti.2011. “Negara Hukum yang Berkeadilan, kumpulan pemikiran dalam rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.”. *Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung
- Tom Ginsbrug.2013. “*Why Do Countries Adopt Constitutional Review?*”. *Journal of Law, Economics, and Organization*, Forthcoming University of Virginia School of Law, Public Law and Legal Theory Research Paper Series
- Wahyu Nugroho. 2016. “*Legal Policy Post-Constitutional Court Decision on the Organisation of General Elections and Local Election in Indonesia*”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.

INTERNET

Agus Riewanto. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/88124/melindungi-hak-pilih>, diakses pada 1 Maret 2019

Agus Riewanto, Mahkamah Konstitusi Tak Progresif, *Harian Kompas*, 20 Juli 2015, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 21.30 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/9849/5/4.PEMBAHASAN.pdf> , diakses tanggal 7 November 2018 Pukul 15.30 WIB

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150709064704-32-65322/mahfud-md-putusan-mk-terkait-politik-dinasti-sudah-tepat/>., diakses tanggal 17 maret 2019 pukul 21.30 WIB

J. Kristiadi, “Dinasti Politik, Sebab atau Akibat?,” *Kompas*, 21 Juli 2015, diakses pada 26 April 2019 Pukul 21.30 WIB

MarwanMas, <http://makassar.tribunnews.com/2014/12/03/mencabut-hak-politik-koruptor>, diakses tanggal 19 Maret 2019 Pukul 13.20

Mimin Dwi Hartono, Staf Senior Komnas HAM Pencabutan Hak Politik Koruptor, *berita Kompas Selasa*, 14 Maret 2017, diakses 12 April 2019 Pukul 12.00 WIB.

Ramlan Surbakti dalam Pemilu Berintegritas dan Adil, *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 – 017/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 – 24/PUU – VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan MK Nomor 15/PUU – VI/2008 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 04/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan MK No: 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

